



**KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Tesis ini Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : SEMERU, SH
NIM : B4A 000286
KELAS : SPP KEJAKSAAN

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. ANDI HAMZAH, SH

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2003**

KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Disusun Oleh :

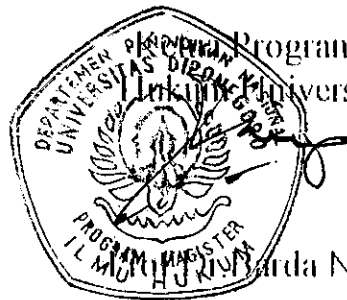
SEMERU, SH
NIM.B4A000286

Tesis ini telah disetujui untuk dilakukan pengujian
pada tanggal 30 Oktober 2003


Mengetahui :

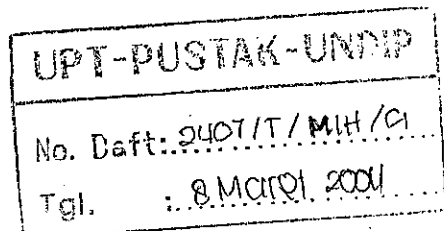
Pembimbing


Prof. Dr. Andri Manzah, SH



Program Magister Ilmu
Hukum Universitas Diponegoro


Barda Nawawi Arief, SH



DEDIKASI

Doa : Tuhanku, berikan aku Ilham untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugrahkan kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal sholeh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Saleh (An-Namal ;19)

Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Alloh, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Sekalipun terdakwa itu kaya atau miskin, maka Alloh lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap kaumnya. 1)Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan. Dan kalau kamu memutar-balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Annisaa ;135)

Law and justice are not always the same. When they aren't destroying the law may be the first step toward changing it. (Gloria Steinem)

Kubaktikan karyaku ini kepada :
Kedua orang tuaku tercinta.

KATA PENGANTAR

Bismillahirromanirroohim

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Illahi yang melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : "KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA".

Di samping untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, penulisan tesis ini merupakan sumbangan pemikiran pengetahuan penulis sebagai dharma bakti kepada korps adhyaksa. Diharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan semua orang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Semin Sumardjo dan Ibu Poniyeem, yang selalu mendoakan, mengasuh, membimbing, dan memberikan semangat kepada penulis agar selalu menjadi manusia dan sarjana muslim yang baik.
2. Bapak Prof.Dr.Andi Hamzah, SH, selaku pembimbing yang penuh kesabaran, kearifan dan kebijaksanaan selalu menuntun penulis untuk dapat menyusun tesis ini mulai dari awal (proposal) hingga selesainya tesis ini.
3. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH, selaku pengajar dan Ketua Program Magister Ilmu hukum UNDIP yang memberikan masukan, kritik dan saran-saran

yang berharga bagi penulis terutama pada saat pemilihan judul tesis dan review proposal.

4. Bapak Dr.Nyoman Serikat Jaya, SH, dengan kearifan dan kebijakannya memberikan saran dan masukan yang berharga tentang pengetahuan dan wawasannya guna penyempurnaan tesis ini terutama pada saat review proposal.
5. Bapak Dr.Paulus Hadi S. SH, dengan kesabaran dan ketelitian memberikan saran dan masukan tentang pengetahuan dan wawasannya guna penyempurnaan tesis ini, terutama pada saat review proposal.
6. Kakakku Sutarni, Ratno Widodo, adikku Ratna Ningsih, Kekasihku Sekaring Dyah Ika Wulan dan segenap handai tolan yang selalu membantu dan mendoakan penulis.
7. Rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum UNDIP angkatan 2001, khususnya rekan-rekan pada kelas khusus kejaksaan.

Demikian sebagai pengantar dan dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan masukan bagi penyempurnaan tesis ini.

Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Oktober 2003

Penulis

SEMERU, SH

ABSTRAK

Selama ini banyak terjadi tindak pidana yang belum terungkap karena kurangnya alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi. Di samping itu selama ini perhatian para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Peraturan perundangan yang ada di rasakan belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. Persoalan pembuatan peraturan perlindungan saksi ini adalah masalah kebijakan. Kebijakan adalah suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu yang ditetapkan secara kolektif. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana merupakan suatu kebijakan.

Kebijakan ini merupakan kebijakan hukum pidana dalam arti luas yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil. Kebijakan pembuatan perundang-undangan adalah tahap yang strategis dalam rangka mendasari kebijakan selanjutnya. Kebijakan yang di angkat dalam tesis ini adalah kebijakan selama ini, bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan ke depannya dalam memberi perlindungan saksi. Tujuan yang di dapat dari penulisan tesis ini diharapkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan perlindungan saksi selama ini, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi selama ini dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ke depan dalam memberi perlindungan saksi.

Metode penulisan dalam tesis ini adalah yang utama dengan pendekatan yuridis normatif, di samping di dukung juga penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif berasal dari data kepustakaan tentang peraturan perundangan perlindungan saksi yang ada selama ini dan rancangan perundangan perlindungan saksi. Pendekatan yuridis empiris yang diperoleh dari data di lapangan untuk menjawab pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi selama ini.

Kebijakan perlindungan saksi selama ini dapat diketahui dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU No.8 Th 1981, UUNo.5 Th 1997, UU No.22 Th 1997, UU No.28 Th 1999, UU No.26 Th 2000, UU No.20 Th 2001, UU No.15 Th 2002, Perpu No.1 Th 2002. Kebijakan selama ini secara tertentu sudah di atur dalam masing masing Undang-Undang, seperti UU No.20 Th 2001 dalam tindak pidana korupsi, sedangkan secara umum KUHAP secara tidak langsung mengatur perlindungan saksi. Namun kebijakan perlindungan saksi selama ini belum diatur secara jelas, lengkap dan komprehensif. Pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal, yang disebabkan oleh beberapa kendala. Pemerintah melihat belum jelasnya peraturan perlindungan saksi dan perlunya suatu perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur perlindungan saksi, maka di susunlah Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban.

ABSTRACT

Until now, there are many criminal act which not yet been revealed caused by insufficient evidence appliance. One of them is information from witness. Furthermore, all this time, the interest of policy maker, government law officer prefer most on the criminal actor, very less to witness whose actually play a part to reveal criminal act. The existed regulation, has not yet perceive adequate in giving protection to witness. This witness protection regulation making is a matter of policy. Policy is a decision which emphasize the way of which is the most effective and most efficient to reach specified thing collectively. The witness protection in course of criminal justice represent a policy.

This policy represent policy of criminal law in wide meaning, concerning material and formal criminal law. Regulation-making policy is the strategic phase to constitute policy here in after. The policy discussed in this thesis is policy during the time, how is the execution of the policy and how it give protection of witness in the future. The objective goal from writing of this thesis was expected to know how is the policy of witness protection and to know how it give protection to witness in the future.

The main writing method in this thesis *juridical-normative* approach and be supported *juridical-empiris* approach. The data about *Juridical-normative* approach achieved from library. It contain the existing witness protection regulation during the time and its legal drafting witness protection. This *juridical-normative* approach obtained from field data has been the reply of the execution of witness protection policy all the time being.

The existing witness protection policy can be recognized from some existing law and regulation like UU the no.8 1981, UU No. 5 the 1997, UU No. 22 the 1997, UU no. 28 the 1999, UU. No. 26 the 2000, UU no. 20 the 2001, UU no. 15 the 2002, Perpu no. 1 the 2002. The existing policy has been specifically arranged in each law, like UU no. 20 the 2001 in corruption act, while in general, KUHAP indirectly arrange protection of witness. But the existing witness protection policy not yet been clearly, comprehensively and fully regulated. The execution of this policy not yet fully optimal, which because of some constraint. Governmental seen the witness protection regulation as vague, and the law to regulate witness protection comprehensively is needed, thus they plan on Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban (Legal drat of Witness and Victim Protection Regulation)

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Dedikasi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstraks.....	vii
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian dari Kebijakan Kriminal...	24
B. Kebijakan Untuk Memberi Perlindungan Saksi.....	31
C. Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.....	42

1. Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	44
2. Pengaturan Saksi Dalam KUHAP.....	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Legislatif Selama ini Dalam Memberi Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.....	67
B. Pelaksanaan Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.....	103
C. Kebijakan Legislatif di masa mendatang Mengenai Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.....	126

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	143
B. Saran-saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA.....	148
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak dari tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajah. Kemerdekaan yang telah dicapai ini, bukan berarti sudah selesai perjuangan bangsa Indonesia, bahkan sebaliknya proklamasi adalah merupakan awal dimulai pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Harus diakui setelah Indonesia merdeka masih banyak sekali produk peraturan perundang-undangan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda. Banyak peraturan perundangan-undangan warisan kolonial yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan rasa keadilan masyarakat karena tidak mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia, sehingga menjadi penting untuk melakukan pembaharuan hukum.

Sebagai negara bekas jajahan, tunggakan sejarah yang belum lunas di bayar oleh bangsa kita hingga saat ini adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial-feodalistis dengan perundang-undangan yang beretos egalitarian-demokratis sesuai status bangsa yang merdeka dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.¹ Undang Undang Dasar 1945 adalah wujud pertama adanya suatu pembaharuan hukum di Indonesia.

¹ Artidjo Alkostar dan M.Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perpektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.IX

Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Subekti mengatakan hal ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah :

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan lain yang manapun.²

Mengenai hal ini **Muhammad Yamin** berpendapat sebagai berikut :

“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik (Indonesia) itu hanya berdasarkan dan berasal pada Undang Undang dan sama sekali kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Reublik Indonesia ialah suatu negara hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah negara polisi atau negara militer”.³

Usaha menjunjung tinggi hukum tersebut juga diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomer IV/MPR/1999.

Bab IV huruf A angka 1 menyatakan “mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum”. Selanjutnya dalam angka 3 menyebutkan “menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Pada angka 9 mengatakan “meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan”.⁴

² Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal.4

³ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian perkara Pidana Berdasarkan KUHP: Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hal.3

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *GBHN 1999*, hal.61

Salah satu ciri dari negara hukum adalah persamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*) dan adanya supremasi hukum (*Supremacy of law*). Ciri ini tampaknya terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Menurut **Sumaryanti**, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil/militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁵

Bambang Sunggono mengatakan “Pembangunan yang terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan. Namun demikian, intensitas serta kesibukan dalam upaya untuk menyusun suatu tatanan kehidupan yang baru di Indonesia, melalui pembangunan dan modernisasi, ternyata memberikan pengaruh terhadap dunia hukum.”⁶

Di dalam suatu negara, hukum dapat berlaku efektif memerlukan kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan dalam membuat hukum berupa kebijakan. Kebijakan untuk membuat suatu peraturan perundang undangan atau yang disebut tahap formulasi adalah sangat strategis, karena merupakan dasar untuk menentukan tahapan kebijakan selanjutnya. Menurut **Barda Nawawi Arief** dikatakan terdapat tiga

⁵ Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia : Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, hal.2

⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.1

maka keseluruhan sistem undang-undangnya harus mendukung ke arah itu. Bertolak dari kerangka pikir yang demikian, maka patut dikaji ulang keseluruhan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana yang ada selama ini.¹¹

Kalau diidentifikasi kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam pembuatan perundang-undangan, maka patut dikaji ulang perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana selama ini, termasuk masalah saksi. Pengaturan tentang saksi penting karena saksi selalu ikut berperan dalam sub sistem peradilan pidana yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam pengadilan.

Suatu proses sistem peradilan pidana (SPP) akan dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Pihak-pihak tersebut adalah aparat penegak hukum yang menjalankan hukum, pihak lainnya (saksi salah satunya) yang terkait dalam terjadinya suatu tindak pidana. Proses peradilan pidana dapat berjalan karena di atur oleh hukum acara pidana. Mengenai pengertian hukum acara pidana ini *Sudarto* menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana yang dilanggar.¹²

Menurut *Simon* pengertian hukum acara pidana ini adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan

¹¹ Barda Nawawi Arief, Ibid, hal.38

¹² Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal.2

haknya untuk memidana.¹³ Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa hukum acara pidana adalah merupakan hukum untuk berproses dalam menjalankan ketentuan hukum pidana oleh aparat hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Seorang yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan suatu kewajiban menurut hukum kecuali ditentukan lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 522 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, di ancam dengan pidana denda paling lama sembilan ratus rupiah.”¹⁴

Pemanggilan sebagai saksi itu dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan, dan pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Meskipun memenuhi panggilan sebagai saksi adalah suatu kewajiban, tetapi tidak jarang orang menghindar untuk menjadi saksi dengan berbagai macam alasan, seperti takut ancaman dari pelaku atau takut di paksa oleh penyidik dan dapat juga takut untuk dijadikan terdakwa. Kondisi ini tentunya dapat menghambat berjalannya proses peradilan pidana.

¹³ Ansorie Sabuan, Syarifudidin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal.64

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP Yang telah Disesuaikan Dengan Undang Undang Baru*, Ghalia Indonesia, 1986, hal.238

Azhar Muchlis (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ketua PANJA

Baleg RUU Perlindungan Saksi dan Korban) mengatakan sebagai berikut :

Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini belum dapat diselesaikan secara cepat, ataupun tidak terungkap. Contohnya, kasus pemerkosaan pada pertengahan Mei 1988, kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus KKN kasus pelanggaran HAM di Aceh, Timtim, Ambon dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya atau kurangnya informasi yang didapat dari saksi dan korban. Seberapa besar saksi dan korban merasa enggan atau takut memberi keterangan karena tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas. Apalagi dalam kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan tertentu dalam masyarakat termasuk yang dapat mempunyai peluang untuk memberikan tekanan atau intimidasi pada saksi dan korban.

Di lain pihak, terlihat kurangnya perhatian dari para aparat hukum, bahkan masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban, maupun keluarganya. Hal ini juga didukung oleh belum memadainya perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada saksi dan korban untuk dapat menyampaikan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. KUHAP yang merupakan ketentuan hukum acara pidana, yang dikatakan sebagai karya agung bangsa Indonesia, atau perundang-undangan lainnya, belum memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pembentuk UU pada waktu itu, lebih memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan saksi dan korban terabaikan. Padahal, tanpa saksi dan korban penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi saksi dan korban sangat dibutuhkan.¹⁵

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian masyarakat dalam masalah kesaksian dalam proses peradilan pidana adalah kasus Endin Wahyudin.

Sebagaimana yang di tulis dalam *Hukum Online* Jakarta sebagai berikut :

...Kekecewaan Endin Wahyudin sudah menumpuk dan memuncak."Saya marah dan kecewa," ujar terdakwa perkara dugaan pencemaran nama baik dua orang hakim agung. Ungkapan keras Endin itu ditujukan kepada Tim Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Endin mengemukakan bahwa TGPTPK, Adi Andoyo Soetjipto (mantan Ketua TGPTPK), dan mantan Jaksa

¹⁵ Azhar Muchlis, *Peran DPR Dalam Melakukan Advokasi Kebijakan Sistem Perlindungan dan Dukungan Bagi Saksi Dan Korban*, disampaikan pada Round Table Discussion Komnas Perempuan, Jakarta, 20 Februari 2002

Agung Marzuki Darusman telah membuat dirinya teraniaya. Ia merasa ditinggalkan dan berjuang sendirian setelah berusaha menjadi "pahlawan". Majelis Hakim yang dipimpin Amiruddin Zakaria mengadili Endin karena melaporkan dua hakim agung Marnis Kahar, Suprptini Sutarto, dan Yahya Harahap (mantan hakim agung) kepada TGPTPK. Ketiganya dilaporkan menerima suap sebesar Rp 196.000.000,- supaya memenangkan "klen" Endin, dirinya mau melaporkan penyuapan yang dilakukannya kepada majelis hakim agung yang dipimpin Yahya Harahap tersebut setelah mendapatkan jaminan dari Adi Andojo bahwa dirinya tidak akan di adili. Hal ini pun dibenarkan Adi Andojo, seperti yang diungkapkannya dalam kesaksian pada persidangan minggu sebelumnya. "Laporan Endin saya anggap sangat berharga sekali, karena memang laporan seperti itu selama ini tidak ada buktinya yang cukup," cetus Adi saat itu pada majelis hakim. Alasan itulah yang mendorong Adi untuk memberikan pernyataan guna memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Endin Wahyudin. Perlindungan itu bahwa Endin Wahyudin tidak akan diadili karena perbuatan yang dilaporkan kepada TGPTPK. Bukan hanya Adi Andojo sebagai Ketua TGPTPK, Jaksa Agung Marzuki Darusman saat itu juga memberikan jaminan serupa kepada Endin Wahyudin. Marzuki mengakui bahwa dirinya telah mengeluarkan maklumat guna memberikan jaminan perlindungan terhadap Endin. "Selain itu, juga mulai banyaknya tekanan terhadap beberapa saksi kasus tersebut, sehingga perlu memang diberikan perlindungan bagi saksi pelapor seperti Endin," tandas Marzuki. Maklumat jaksa Agung itu berupa kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor jika Endin bersedia memebrikan keterangan terhadap kasus yang melibatkan dirinya. Maklumat tersebut mengesampingkan perkara yang melibatkan saksi pelapor guna mengungkap kasus-kasus KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang ada dilingkungan peradilan. Maklumat tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Adi dengan meminta perlindungan saksi kepada pihak kepolisian Jawa Barat dan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.¹⁶

Contoh kasus lain adalah yang dialami oleh Muhammad Guntur sebagaimana yang ditulis Koran Kompas sebagai berikut :

Muhammad Guntur adalah salah seorang saksi kasus tewasnya almarhum Nasarudin, tahanan kepolisian sektor Metro Pekayon, Bekasi Selatan, yang mengalami ancaman dan intimidasi terhadap dirinya bahkan keluarga dan isterinya juga mengalami teror. Atas penderitannya itu ia meminta perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut pengaduannya kepada Komisi Nasional Hak Asasi, penangkapan terhadap dirinya pertama kali dilakukan oleh seorang anggota polisi berseragam, tanpa surat perintah dan dibawa ke Polsek

¹⁶ Hukum Online, Jakarta, 15 Agustus 2001

Bekasi untuk dibuatkan berita Acara. Setelah kurang lebih dua jam baru dipulangkan. Ia ditangkap lagi oleh dua orang anggota polisi berseragam ketika sidang akan berlangsung di Mahkamah Militer II-08, Jakarta Timur, dimana waktu itu dia baru selesai sholat Dhuhur. Salah satu dari dua orang tersebut adalah teman terdakwa Ajun Inspektur Polisi Tingkat II (Aida) makmur Sinuaji. Mereka memaksanya agar sebaiknya mengaku telah ditekan korban dan telah dibayar untuk melakukan pengakuan di depan Sidang mahkamah Militer II-08.¹⁷

Kejadian – kejadian terhadap saksi seperti di atas akan berdampak tidak baik bagi berjalannya proses peradilan karena saksi sebagai salah satu alat bukti tidak dapat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Kebijakan perundang-undangan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana selama ini patut dipertanyakan.

Peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap kebijakan legislatif dalam memberi perlindungan terhadap saksi, untuk itu dilakukan penelitian dalam bentuk penyusunan tesis dengan judul : **“KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”**

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang pemikiran yang diuraikan di atas, maka dalam rangka penelitian ini akan dibatasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁷ Kompas, 30 September 2001

1. Bagaimana kebijakan legislatif selama ini dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan legislatif selama ini dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana ?
3. Bagaimanakah kebijakan legislatif pada masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan legislatif selama ini dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan legislatif selama ini dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui kebijakan legislatif pada masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

D. Kontribusi

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini diharapkan berfaedah bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau wacana yang luas mengenai pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum perlindungan saksi pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran nyata tentang praktek penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.¹⁸ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori oleh **Ronny Hanitijo Soemitro** dikatakan adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu.
2. Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interrelasi yang serasi mengenai gejala tertentu.
3. Pernyataan di dalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk lingkupnya.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.41

4. Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu.
5. Teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Adanya suatu peradilan pidana yang adil (*fair Trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara yang demokratis. Secara yuridis, kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan, khususnya peradilan pidana akan tergantung pada alat bukti yang berhasil di munculkan di pengadilan. Salah satu alat bukti yang paling menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah yang menyangkut keterangan saksi.²⁰

Suatu peradilan yang adil dengan adanya perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana diperlukan kebijakan yang mengatur masalah tersebut.

Istilah kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai pengganti dari istilah *policy* yang oleh **Sutan Arbi** dan **Wayan Ardhana** diterjemahkan dengan istilah “kebijakan” sebagaimana yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**. Menurut **Robert R. Mayer** dan **Ernest Greenwood** “Kebijakan” (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu yang ditetapkan secara kolektif.²¹

Kebijakan untuk melindungi saksi pada hakekatnya adalah untuk terwujudnya suatu peradilan yang adil untuk dapat mengungkap kebenaran yang materiil. Ide dasar perlunya perlindungan saksi seharusnya adalah mempermudah,

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal.41

²⁰ Azhar Muchlis, opcit. hal.1

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hal.59

memperlancar jalannya proses peradilan pidana dan dengan perlindungan saksi bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan "mengingat bahwa hanya orang yang bersalah saja yang akan terkena sanksi pidana (asas *geenstraf zonder schuld*), maka hukum acara pidana harus menyediakan alat perlengkapan untuk meyakinkan apakah delik yang diduga tadi telah dilakukan. Oleh sebab itu *pencarian fakta atau menemukan kebenaran hakiki merupakan salah satu tujuan pokok administrasi peradilan pidana.*"²²

Kebijakan legislatif yang mengatur masalah saksi selama ini dirasakan masih kurang melindungi saksi dalam proses peradilan pidana. Konsep dasar perlindungan saksi dalam peraturan perundang-undangan selama ini tidak tampak secara jelas. KUHAP sebagai sumber umum/utama hukum acara pidana tidak tampak konsep dasar adanya perlindungan saksi. Peraturan Perundang-undangan tertentu lainnya secara singkat hanya mengatur perlindungan saksi dalam tindak pidana yang di aturnya. Adanya kasus kasus tindak pidana yang tidak terungkap karena tidak adanya alat bukti atau tidak adanya laporan saksi menunjukkan kurang adanya perhatian terhadap saksi selama ini. Seperti contoh kasus Endin Wahyudin, kasus pemerkosaan pada pertengahan Mei 1998, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh, Timor Timur, Ambon dan lain sebagainya.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984, hal.15

Perlindungan saksi perlu karena memudahkan terwujudnya tujuan proses peradilan pidana yaitu mencari kebenaran materiil. Perlindungan saksi ini dapat diwujudkan dalam berbagai macam antara lain :

- Keamanan pribadi dan keluarga dari ancaman fisik atau psikologis.
- Mendapatkan ganti rugi.
- Mendapatkan identitas baru.
- Mendapatkan informasi perkembangan kasus.
- Mendapatkan perlindungan hukum.
- Mendapatkan bantuan hukum dan lain lain.

Ruang lingkup dari perlindungan saksi ini dapat ditentukan ketika mulai menjalani pemeriksaan oleh penyidik sampai jangka tertentu setelah selesainya proses peradilan.

F. METODE PENELITIAN

1. Objek atau Fokus yang diteliti

Objek dari penelitian ini terbatas pada kebijakan legislatif dalam menetapkan peraturan perundang-undangan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana. Kebijakan legislatif dalam penelitian ini adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam

menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.²³

Kebijakan untuk melindungi saksi dalam proses peradilan pidana pada dasarnya adalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.²⁴ **M.Charif Bassiouni** mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** menggunakan istilah : proses legislatif, proses peradilan (*judicial*) dan proses administrasi atau tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.²⁵

Peneliti dalam hal ini melakukan tinjauan terhadap kebijakan legislatif yang memberi perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana. Adapun bahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bagaimana formulasi dalam peraturan perundang undangan yang mengatur masalah perlindungan saksi.
- b. Bagaimana implementasi dari formulasi undang undang yang mengatur tentang perlindungan saksi.
- c. Bagaimana pengaturan perlindungan saksi pada masa mendatang.

²³ Barda Nawawi Arief, *opcit*.hal.59

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal.60

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal.60

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berdasar pada segi-segi yuridis. **Sunaryati Hartono** berpendapat "...jika falsafah atau doktrin ini harus dituangkan ke dalam suatu produk yuridis (perundang-undangan), maka mau tidak mau harus kembali menggunakan pemikiran normatif yuridis-dogmatis".²⁶ Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum. Jika dilihat dari materinya maka pendekatan hukum normatifnya dengan membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal perundang-undangan, pandangan para ahli di bidang tersebut.²⁷ **Ronny Hanitijo Soemitro** dalam hal ini membedakan penelitian hukum normatif dalam :²⁸

1. Penelitian inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto.
4. Penelitian terhadap sistematik hukum.
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

²⁶ Sunaryati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1984, hal.39

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.60

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.cit, hal.12

Langkah pertama dalam metode penelitian ini adalah melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Prosesnya adalah menetapkan identifikasi untuk menyeleksi norma-norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Kedua melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi dan ketiganya melakukan pengorganisasian norma-norma tersebut dalam suatu kerangka yang komprehensif (menyeluruh). Penelitian inventarisasi hukum positif ini dilakukan sebagai syarat awal untuk dilakukannya penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro dalam hal ini mengatakan “Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*.”³⁰ Penelitian hukum demikian ini mensyaratkan sudah diselesaikan inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstracto*. Dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai *premise mayor*, sedangkan fakta-fakta relevan dalam perkara dipakai sebagai *premise minor*. Melalui proses *sylogisme* akan diperoleh sebuah *conclusio* berupa hukum positif *in concreto* yang di cari.³¹

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal.22

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal.22

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal.22

Penelitian ini yang menjadi sasaran adalah masalah kebijakan legislatif dalam mengatur saksi dalam proses peradilan pidana maka pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Kebijakan memformulasikan perbuatan yang memberi perlindungan terhadap saksi menjadi pusat perhatian utama karena pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagaimana yang diungkapkan **Sunaryati Hartono**, bahwa untuk meneliti satu fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode penelitian, walaupun selalu bertitik tolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.³² **Sunaryati Hartono** lebih lanjut mengatakan "Memasukkan atau merumuskan suatu kebijakan yang dilandasi suatu latar belakang falsafah, nilai-nilai kultural, konsepsi-konsepsi, ajaran-ajaran atau teori-teori tertentu, bahwa juga yang dilatarbelakangi oleh penemuan-penemuan empiris, ke dalam produk perundang-undangan, jelas merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang bersifat teknik yuridis dan sistematis."³³ Barda Nawawi Arief dalam hal ini mengatakan metode yuridis dalam arti luas tidak hanya pendekatan normatif logis dan sistematis, tetapi juga pendekatan empirik sosiologis.³⁴ Jadi dalam penelitian ini di samping yang utama menggunakan pendekatan yuridis normatif juga di dukung dengan peneltian yuridis empiris.

³² Sunaryati Hartono, locit, hal.34

³³ Sunaryati Hartono, Ibid, hal.39

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman, Penataran Metodologi Penelitian Hukum*, Unsoed, Purwokerto, 11-15 September 1995, hal.6

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder umum yang dapat diteliti adalah :³⁵

a. Data sekunder yang bersifat pribadi :

1. dokumen-dokumen pribadi
2. data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.

b. Data sekunder yang bersifat publik :

1. data arsip
2. data resmi pada instansi-instansi pemerintah
3. data yang dipublikasikan (misalnya : yurisprudensi Mahkamah Agung).

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder bersifat publik, yaitu data sekunder yang dipublikasikan. Data sekunder bidang hukum yang dipakai dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan yaitu undang-undang yang mengatur masalah saksi. Bahan hukum sekunder adalah rancangan undang – undang yang mengatur perlindungan saksi, pendapat-pendapat sarjana yang

³⁵ Rony Hanitijo Soemitro, Ibid, hal.11

tertuang dalam berbagai tulisan baik berupa buku ataupun karya ilmiah lain yang terkait dengan masalah saksi.

Data bahan hukum selain seperti tersebut di atas, adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang menunjang penelitian. Bahan pustaka yang dimaksud adalah berbagai literatur yang memuat berbagai data yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan saksi seperti buletin atau surat kabar dan literatur lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah :

- a) studi kepustakaan ;
- b) pengamatan (observasi) ;
- c) wawancara (interview) ;
- d) daftar pertanyaan (kuesioner) ;³⁶

Teknik pengumpulan data yang mana yang sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Meskipun demikian tipe data mana pun yang ingin diperoleh, selalu terlebih dahulu harus dilakukan studi kepustakaan.³⁷

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal51

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal.52

kepastakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti yang disebutkan sebelum dalam Angka 4 tentang jenis dan sumber data.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan cara mendatangi lokasi yang menjadi obyek penelitian ataupun menggunakan sarana teknologi internet. Di samping itu dilengkapi pula dengan pengumpulan data melalui wawancara model tidak terarah. Tipe wawancara ini juga disebut wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak berstruktur. Ciri yang utama adalah bahwa seluruh wawancara tidak di dasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauan sendiri.³⁸ Adapun responden dalam penelitian ini adalah penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan beberapa saksi dalam proses peradilan pidana.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹

Soerjono Soekanto mengatakan analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hal.59-60

³⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal.103

tertentu.⁴⁰ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkahlaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁴¹

Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya tetapi juga bermaksud melukiskan realitas kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan dalam hal ini adalah mengenai perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya bagaimana permasalahan selama ini mengenai keadaan saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut ; **Bab I Pendahuluan** yang berisi sub bab Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Untuk **Bab II Tinjauan Pustaka** terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berisikan Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian dari Kebijakan Kriminal, sub bab kedua ; Kebijakan Legislatif Untuk Memberi Perlindungan Saksi, sub bab tiga ; Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV.Rajawali, Jakarta, hal.137

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.cit, hal.93

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Analisis berisi tiga sub bab.

Sub bab pertama Bagaimana kebijakan legislatif selama ini terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, sub bab kedua Bagaimana pelaksanaan kebijakan legislatif mengenai perlindungan saksi selama ini dalam proses peradilan pidana. Sub bab ke ke tiga Bagaimana kebijakan legislatif di masa mendatang mengenai perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

Mengenai **Bab IV Penutup** merupakan bab terakhir terdiri dari dua sub bab yaitu bab mengenai kesimpulan dari tesis ini dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian Dari Kebijakan Kriminal.

Kebijakan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai” 1) kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan ; 2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dipelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tertentu pemerintah, organisasi dan sebagainya) ; pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai pedoman untuk manajemen usaha mencapai sasaran ; garis haluan ;⁴²

Menurut **Robert R.Mayer** dan **Ernest Greenwood** “Kebijakan” (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁴³ **Sudarto** mengatakan “Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hekekatnya dalam masalah kebijakan, orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alterlatif.”⁴⁴

Pengertian kebijakan legislatif dalam hal ini adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam

⁴²W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984

⁴³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal.59 (Dikutip dari Sutan Arbi dan Wayan Ardana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, yang merupakan terjemahan dari “The Design of Sosial Policy” tulisan Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood)

⁴⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal.161

menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁴⁵

Kebijakan untuk menggunakan hukum pidana ini adalah cara untuk mengatasi terjadinya tindak pidana/kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*".⁴⁶

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), sasaran/adresat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/aparat penegak hukum.⁴⁷ **Barda 'Nawawi Arief** menyebutkan istilah "kebijakan" di ambil dari istilah "*policy*"(Ingris) atau "*politiek*"(Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law*" atau "*Strafrechtspolitik*".⁴⁸ Menurut **A. Mulder**⁴⁹ "*Strafrechts politiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan :

⁴⁵ Ibid, (Kutipan dari David L.Sills,Editor, Internasional Encyclopedia of The Social Sciences, Volumes 13 and 14, Collier-Madmillan Publisher, London, 1986, hal.204)

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal.149 (Tulisan dari Barda Nawawi Arief yang mengutip dari Gene Kessebaurn, Delinquency and Social Policy, 1974, hal.93)

⁴⁷ Barda Nawawi Arief (3), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.29

⁴⁸ Barda Nawawi Arief (4), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 1996, hal.27

⁴⁹ A.Mulder, "Strafrechtspolitik" Delikt en Delinkwent, Mei 1980, hal.333, sebagaimana di kutif oleh Barda Nawawi Arief dalam buku "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana",hal.28

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Lebih lanjut dikatakan definisi Mulder bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut **Marc Ancel** yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :⁵⁰

- (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
- (b) suatu prosedur hukum pidana, dan
- (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Apabila dilihat dari sudut politik kriminal terlihat pula pendapat **Van Bemmelen** yang mengemukakan sebagai berikut :⁵¹

"Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya tetapi dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan itu (yakni penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Jika kita

⁵⁰ Ibid, hal.29

⁵¹ Barda Nawawi Arief (1), Opcit, hal.20-21.(Kutipan dari Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1, Het Materiele Strafrecht Algemmen Deel, Zesde herziene druk*, H.D.Tjeenk Willink, Groningen, 1979, hal.21-22)

mendekati hukum pidana dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan, kita sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal mana negara berhak untuk bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum acara pidana”.

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi kejahatan adalah merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. **Sudarto** mengatakan apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*social defence planning*" yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵² Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁵³ Praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.⁵⁴ **Sudarto** lebih lanjut mengatakan

⁵² Sudarto (1), Op.cit, hal104

⁵³ M.Hamdan, Politik Hukum Pidana, P.T.Raja Grafindo Persada, 1997, hal.20

⁵⁴ Ibid, hal.24 (Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal 157)

politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal itu sendiri dapat diartikan dalam 3 (tiga) pengertian yaitu : ⁵⁵

1. Dalam pengertian yang sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, politik kriminal itu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti yang paling luas, politik kriminal itu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Marc Ancel mengatakan yang disebut “politik kriminal” adalah salah satu bentuk dari perencanaan sosial ialah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁶ Suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “*a rational total of responses to crime*”. Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.⁵⁷ Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama

⁵⁵ Sudarto, Opcit, hal.152

⁵⁶ Barda Nawawi Arief (1), Loc.cit, hal.31

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.cit (Tulisan Barda Nawawi Arief kutipan dari G.P.Hoefnagels, The other side of criminology, 1973, hal.99,102, 106)

yang sering disebut dengan istilah misalnya "kebahagiaan warga masyarakat/penduduk" (*happiness of citizens*) ; "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*a wholesome and cultural living*), "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) atau untuk mencapai "keseimbangan" (*equality*).⁵⁸ **Barda Nawawi Arief** dalam hal ini dengan memperhatikan tujuan tujuan tersebut , maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁹ **Barda Nawawi Arief** lebih lanjut mengatakan usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana yang "non penal".⁶⁰ Sehubungan dengan ini, **Radzinowicz** menyatakan "kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhan itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur".⁶¹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

⁵⁸ Ibid, hal.158

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Barda Nawawi Arief (1), Loc.cit, hal.33-34 (dikutip dari Karl O.Christinsen, Some consideration on Possibility of rational criminal Policy, Resource material Series No.7, 1974 UNAFEI TOKYO, hal.74 : "Criminal policy must combine the various preventive and adjust them so as to from a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of State activity")

(2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁶²

Sudarto dalam hal ini berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :⁶³

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila ; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat ;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum , yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal.160 (lihat pula Barda Nawawi Arief (1) hal.35)

⁶³ Sudarto (1), Loc.cit, hal.44-48

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*"Social Policy"*) yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" (*"Social Welfare Policy"*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" (*"Social-Defence Policy"*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (*"Penal Policy"*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*Social-Welfare*" dan *Social-Defence*".⁶⁴

B. Kebijakan Hukum Pidana untuk Melindungi Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud perlindungan adalah usaha sistematis memberikan sesuatu.⁶⁵ W.J.S Poerwadarminta mengatakan kata perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang artinya bernaung meminta pertolongan (kepada yang berkuasa, dan sebagainya) supaya selamat tidak kena bencana, dan sebagainya). Kata lindung tersebut berubah menjadi perlindungan apabila di tambah awalan pe- yang artinya perbuatan melindungi.⁶⁶ Perlindungan saksi dalam tulisan ini adalah usaha sistematis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana. Saksi adalah orang yang dapat

⁶⁴ Barda Nawawi Arief (3), *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.73

⁶⁵ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, hal.595

⁶⁶ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal.599

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (KUHP Pasal 1 butir ke-26). Pengertian saksi dalam hal ini terkait dengan proses peradilan pidana, sehingga seorang pelapor, korban, ataupun tersangka/terdakwa dapat pula menjadi saksi dalam suatu proses peradilan pidana.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah masalah kebijakan. Ide dasar perlindungan saksi adalah untuk mempermudah, memperlancar proses peradilan pidana dengan cara memberi rasa aman terhadap saksi dalam memberikan keterangannya dalam proses peradilan pidana, sehingga tercipta suatu peradilan yang adil untuk mencapai kebenaran materiil. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah juga persoalan hukum pidana, jadi kebijakan hukum pidana sangat terkait dalam pengaturan perlindungan saksi. Upaya untuk melindungi saksi dengan hukum pidana dapat berupa perumusan perbuatan tertentu yang berupa hukum pidana materiil dan dapat pula berupa ketentuan-ketentuan untuk menjalankan hukum pidana atau yang disebut hukum formil. Bentuk perumusan perbuatan tindak pidana seperti penganiayaan, pengrusakan pembunuhan dan seterusnya yang terdapat dalam hukum pidana materiil (KUHP dan di luar KUHP) ini secara tidak langsung dapat merupakan upaya perlindungan terhadap individu dalam hal ini adalah seorang saksi. Saksi adalah salah satu pihak yang terkait dengan proses peradilan pidana maka ketentuan hukum acara sangat penting dalam rangka berperan untuk melindungi saksi. Hukum acara dapat memberikan perlindungan kepada saksi yang berupa memberi hak-hak tertentu kepada saksi seperti hak untuk

mendapatkan rasa aman dari ancaman/gangguan pihak lain, hak untuk diperlakukan yang seyogyanya menurut hukum oleh aparat hukum, hak memperoleh ganti rugi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.

Usaha atau kebijakan untuk membuat pengaturan mengenai saksi pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Suatu kejahatan dapat diungkap dalam proses peradilan karena adanya alat bukti, yang mana salah satu alat bukti yang penting adalah keterangan saksi. Kebijakan menggunakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah merupakan bagian dari politik kriminal. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.⁶⁷

Pemberian perlindungan saksi sebagai salah satu bentuk usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di

⁶⁷ Barda Nawawi Arief (1), Loc.cit, hal.38

belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁶⁸ Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).⁶⁹

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.⁷⁰ Kebijakan penegakan hukum ini dapat dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) dengan harapan dapat terciptanya suatu peradilan yang adil dan jujur.

Usaha pemberian perlindungan kepada saksi sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Defence*). Kebijakan atau politik hukum pidana adalah juga bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*Social Policy*) yang dapat diartikan sebagai segala

⁶⁸ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal.69

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy*, di dalamnya tercakup *social welfare policy*. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,⁷¹ maka oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada individu saksi dalam proses peradilan pidana berarti sekaligus mengandung pengertian memberikan pula perlindungan pada masyarakat. Eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat,⁷² atau dapat di katakan masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu antara masyarakat dan individu saling terkait.

Marc Ancel dalam hal ini mengatakan tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dalam hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum

⁷¹ Barda Nawawi Arief (2), Op.cit, hal 3

⁷² Periksa Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat, Jakarta, 1992, hal.9

secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.⁷³

Muladi dalam hal mengatakan argumen lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap individu korban (*pen.korban* dapat pula sebagai saksi) adalah berdasar kontrak sosial (*Social Contract Argument*) dan argumen solidaritas sosial (*Social Solidarity Argument*). Yang pertama menyatakan, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi (*Eigenricting*). Maka dari itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. (*pen.dalam hal ini korban sekaligus adalah saksi*) Argumen kedua menyatakan negara harus menjaga warga dalam memenuhi kebutuhan atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dengan masyarakat lain berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁷⁴

Kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini lebih berorientasi pada pelaku kejahatan antara lain adalah dengan melakukan pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan (LP), sementara perhatian terhadap korban terabaikan. Pengertian korban dalam hal ini adalah korban yang terkait pula sebagai saksi pada peradilan pidana. Kebijakan untuk melindungi korban pada dasarnya akan

⁷³ Barda Nawawi Arief (1), Op.cit, hal.27-28

⁷⁴ Muladi, Op.cit, hal.176-177

mempunyai imbas juga terhadap perlindungan saksi, karena seorang korban akan berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Membahas masalah saksi dalam hal ini akan banyak terkait dengan korban, maka untuk itu dalam tulisan ini akan diuraikan juga kebijakan untuk melindungi korban. Terjadinya berbagai kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari kejahatan itu terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakan. Kerugian yang diderita itu, bisa di derita oleh korban itu sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini, bisa termasuk pihak yang melihat, mendengar sendiri yang menjadi saksi. **Barda Nawawi Arief** dalam hal ini berpendapat pula, dalam hal korban akan membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk memperoleh bantuan hukum (penasehat hukum) secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, harus pula tersedia fasilitas untuk menampung "pengobatan" mereka.⁷⁵ Khususnya bagi mereka yang mengalami tekanan bathin (korban perkosaan atau penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan oleh ahli-ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar. Dalam kaitan ini, hak yang

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, (4), "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato pengukuhan, Diucapkan Pada peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, hal.2

diberikan kepada korban dalam KUHAP untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian serta meminta pemeriksaan praperadilan, merupakan bukti bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak-hak korban sudah mulai memperoleh perhatian yang seharusnya.⁷⁶

Jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Jenis kerugian dalam hal ini dapat dibedakan dua yaitu kerugian yang bersifat fisik/materiil yang dapat diperhitungkan dengan uang dan kerugian yang bersifat non fisik atau immateriil yang misalnya berupa perasaan takut, sedih, rasa sakit, kejutan psikis dan lain lain.

Mardjono Reksodiputro mengatakan terhadap penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban dan hubungannya dngan kejahatan yang terjadi terdapat dua permasalahan yaitu :⁷⁷

1. bahwa untuk si korban, perlu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada penderitaan yang dialami karena terjadinya delik itu, dan
2. bahwa untuk si pelaku delik, perlu pula diketahui bagaimana peranan korban dalam hal terjadinya delik, maupun kejahatan pada umumnya.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief (4), Ibid hal.67

⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, UI, Jakara, 1994, hal.76

Mardjono Reksodiputro lebih lanjut menjelaskan pemikiran pada butir ke 1 diatas, akan mempunyai pengaruh pada (ilmu) hukum pidana dan proses peradilan pidana. Kalau benar dapat ditunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sekarang ini tidak/kurang memberikan kepuasan kepada korban, dalam arti tidak/kurang memberikan perhatian kepada kepentingan yang dilanggar (dirugikan), maka mungkin diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang hal ini.⁷⁸

Pembaharuan hukum pidana ini seyogyanya memuat hak hak korban kejahatan. **Arif Gosita** mengenai hak dan kewajiban korban dikatakan sebagai berikut :⁷⁹

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi kerana tidak memerlukannya).
3. Berhak mendapatkan untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.

⁷⁸ Ibid, hal.84-85, Tugas peradilan pidana adalah luas , yaitu meliputi ; a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah di pidana, dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

⁷⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademi Presindo, Jakarta, 1983, hal.52-53

6. Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya.
7. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
8. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Adapun ruang lingkup kewajiban korban, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Ikut serta membina pembuat korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
7. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk membayarkan restitusi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Mardjono Reksodiputro mengenai hak korban mengatakan “Pertama-tama harus harus diciptakan suatu iklim di mana korban mau melaporkan ‘nasibnya’

dan bebas dari kemungkinan tekanan-tekanan ataupun ketakutan untuk melapor. Keadaan seperti ini tentunya harus dibarengi dengan tempat-tempat pelaporan (resmi, semi resmi dan swasta) yang tidak saja mampu menerima laporan tetapi juga mampu mengambil keputusan tindak lanjut. Hal yang terakhir ini paling tidak berarti adanya petugas-petugas terlatih yang mampu memberikan informasi dan nasehat tentang jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh korban dan memperjuangkan haknya”.⁸⁰ **Barda Nawawi Arief** dalam hal ini menambahkan, dalam hal korban akan membawa permasalahannya ke pengadilan maka harus tersedia kemungkinan untuk memperoleh bantuan hukum (penasehat hukum) secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu korban yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis, harus pula tersedia fasilitas untuk menampung “pengobatan” mereka.⁸¹ Khususnya bagi mereka yang mengalami tekanan bathin (korban perkosaan atau penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan oleh ahli-ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar. Dalam kaitan ini, hak yang diberikan kepada korban dalam KUHAP untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian serta meminta pemeriksaan praperadilan, merupakan bukti bahwa dalam sistem

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994b, Op.cit., hal.92

⁸¹ Barda Nawawi Arief, 1998, Op.Cit., hal 67

peradilan pidana Indonesia, hak-hak korban sudah mulai memperoleh perhatian yang seharusnya.⁸²

C. Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Pemeriksaan di dalam perkara pidana maupun perkara perdata di persidangan pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara itu. Berdasarkan hasil pembuktian mana, hakim akan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sebaik-baiknya terhadap perkara itu, kemudian memberikan keputusan seadil-adilnya dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku.⁸³

Adapun peranan saksi dalam perkara pidana adalah untuk diperolehnya kebenaran yang sebenar-benarnya. Sampai kini keterangan saksi oleh undang-undang dipandang sebagai alat bukti yang penting, meskipun dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dalam pembuktian secara ilmiah dengan cara mempergunakan bukti-bukti berupa benda mati atau lazimnya disebut saksi diam (*silent witness*) yang lebih dapat dipercaya kebenarannya dari pada keterangan seorang saksi.⁸⁴ Hal ini disebabkan kerana seorang saksi memberikan kesaksiannya itu kerap kali jatuh dari keadaan yang senyatanya baik sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini tergantung dari kecakapan setiap orang untuk menangkap dengan panca indera, mengingat

⁸² Ibid.

⁸³ Riduan Syahrani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Semarang, 1983, hal.107

⁸⁴ Ibid.

tentang apa yang telah ia tangkap dan menceritakan kembali tentang apa yang telah ia tangkap dan ingat itu.⁸⁵

Bagi orang yang telah biasa memusatkan pikiran misalnya, akan lebih mudah mengungkapkan kembali apa yang telah ia tangkap dengan panca inderanya itu daripada orang yang tidak pernah mengontrol pikirannya. Demikian pula halnya dengan orang yang mempunyai panca indera yang tajam akan lebih mudah menangkap keadaan tentang hal-hal sekelilingnya daripada orang yang kurang sempurna panca inderanya. Oleh karena itu dalam memeriksa seorang saksi penyidik dituntut syarat-syarat yang tinggi yakni bukan saja kecerdasan, kepandaian dan keahlian dalam teknik interogasi, tetapi juga kesabaran pengetahuan tentang manusia dan akhirnya penguasaan atau pengendalian penyidik sendiri terhadap dirinya.⁸⁶ Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya, maka penyidik kalau menganggap perlu dapat menggunakan wewenangnya untuk menerapkan alat-alat pemaksa yang istimewa (*bijzondere dwangmiddelen*) yakni penangkapan, penahan, penggeledahan surat.⁸⁷

Apa yang dilakukan penyidik untuk memeriksa saksi dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya tidak lain adalah merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana merupakan pembedaan dalam arti konkrit artinya langkah-langkah operasional yang dilaksanakan oleh badan-badan

⁸⁵ Ibid, hal.46

⁸⁶ Ibid.hal.47

⁸⁷ Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995 hal.48

pendukung stelsel sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, badan pendukung stelsel sanksi pidana itu sendiri ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁸⁸ Sudarto mengatakan “cara kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase mulai dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal (pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidikan) sampai akhir proses itu yaitu pelaksanaan pemidanaan yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana”.⁸⁹

Proses peradilan pidana dalam hal ini dapat dikatakan adalah suatu proses pelaksanaan dari suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP). Selanjutnya dalam tulisan ini akan melihat apa yang dimaksud dengan SPP.

1. Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.⁹⁰

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian

⁸⁸ Sudarto (3), Hukum Acara Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal.4

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ W.A. Shrode dan D.Voich. Organization and Management. Basic System Concepts. Dikutip dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal.48

yang berhubungan satu sama lain". Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterbukaan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁹¹

Satjipto Raharjo dalam hal ini mengatakan pula bahwa apabila suatu sistem ditinjau secara demikian, di dalamnya terkandung pengertian dasar sebagai berikut :⁹²

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian (*wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (ketergantungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Mardjono Reksodiputro mengatakan yang dimaksud dengan sistem dalam SPP adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan dan pemasyarakatan.⁹³ Memahami rumusan ini dilihat dari pendekatan sistem (*system approach*), maka lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan,

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid, hal.48-49

pengadilan dan masyarakat dapat dikatakan sebagai bagian-bagian dari sistem SPP (sub sistem SPP). Menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya** ; Kedudukan alat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi adalah sejajar dan masing-masing sesuai dengan kewenangannya melaksanakan tugas “menetapkan hukum”. Ini berarti menurut pandangan fungsional, menetapkan hukum bukan monopoli dari pengadilan, artinya dengan tidak diteruskannya suatu perkara pidana ke kejaksaan oleh pihak kepolisian sebenarnya pihak kepolisian sudah melakukan pekerjaan “menetapkan hukum” dan begitu pula halnya dengan tidak diteruskannya perkara ke pengadilan, pihak kejaksaan sudah “menetapkan hukum”.⁹⁴ Apabila SPP dilihat sebagai sistem pengendalian kejahatan, maka dapat dipahami betapa besar peranannya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, tiap-tiap sub sistem dalam proses peradilan pidana harus bekerja secara integratif. **Sudarto** mengatakan “Citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan, sampai akhir proses itu ialah pelaksanaan pemidanaan, yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana”.⁹⁵

⁹³ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.(Melihat Kepda Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Bats-batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 30 Oktober 1993.hal.1

⁹⁴ Nyoman Serikat P.J, Hukum Acara Memprogram Tindakan Aparat Penegak Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH UNDIP, tahun XIV, Semarang 1984, hal.23

⁹⁵ Sudarto (3), Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke IV, Semarang, 1980, hal.14

Secara fungsional, SPP merupakan bagian dari politik kriminal, yang pada akhirnya juga merupakan bagian dari politik hukum atau politik penegakan hukum. Hal ini disebabkan fungsi SPP adalah di satu pihak merupakan sarana untuk mengendalikan kejahatan, dilain pihak merupakan program yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan. Kejahatan sendiri pada hakekatnya merupakan proses sosial, sehingga dalam penegakan hukumnya harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal, yang pada akhirnya merupakan politik sosial, menuju kepada kesejahteraan masyarakat.

SPP sebagai suatu sistem harus mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Ukuran-ukuran ini digambarkan oleh **Fuller** dalam "*Prinsiple of Legality*" yang mengandung delapan prinsip atau asas sebagai berikut : ⁹⁶

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

⁹⁶ Sapiro Raharjo, Op.cit., hal.51-52

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Fuller selanjutnya mengatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut di atas sebenarnya tidak hanya sekedar merupakan persyaratan untuk adanya suatu sistem hukum saja, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem tersebut sebagai suatu sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.⁹⁷

SPP dihubungkan dengan hukum acara pidana, maka terdapat perbedaan yang nyata, di mana SPP lebih luas ruang lingkupnya dari hukum acara pidana. SPP dimulai dari perancangan (*drafting*) undang-undang pidana (termasuk acaranya), hukum acara pidana, sampai pada sistem pemasyarakatan atau penjara, termasuk pembinaan (*treatment*) para pelanggar hukum pidana (*offender* atau *law breaker*).⁹⁸ Hukum acara pidana adalah bagian hukum pidana yang mempelajari bagaimana

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Joan Miller, Makalah Lokakarya di Universitas Indonesia, Jakarta, 15 Juli 1991

negara melalui alat-alatnya melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, yang meliputi :⁹⁹

- a. mencari kebenaran ;
- b. mencari siapa pembuat delik tersebut ;
- c. menangkap pembuat, kalau perlu menahannya ;
- d. mengumpulkan bahan bukti untuk diajukan ke sidang pengadilan
- e. putusan hakim ;
- f. upaya hukum untuk melawan putusan tersebut ;
- g. pelaksanaan putusan hakim.

2. Pengaturan Saksi Berdasar KUHAP

Tujuan Hukum Acara Pidana pada akhirnya tidak terlepas dari tujuan SPP pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang adalah bersumber pada Undang Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan ini sudah dirumuskan dalam pedoman pelaksanaan KUHP sebagai sumber hukum pokok dari hukum acara pidana di Indonesia. Adapun tujuan tersebut adalah :

“Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari sipakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam

⁹⁹ J.M. van Bummelen, *Strafvordering*, 1950, hal.1

masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hal-hak korban maupun si pelanggar hukum¹⁰⁰.

KUHAP ini adalah merupakan wujud dari suatu pembaharuan hukum acara pidana, yaitu dengan berlakunya KUHAP berarti mencabut ketentuan hukum acara pidana yang dimuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) produk kolonial.

Subekti mengatakan sebagai berikut ;

Pembaharuan hukum nasional di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰¹

Andi Hamzah dalam hal ini menambahkan KUHAP tersebut menjunjung tinggi, lebih memberi jaminan dan penghormatan dan martabat manusia di mana tersangka dari tingkat pendahuluan yaitu pada tahap pelaksanaan putusan putusan hakim /pengadilan dijamin hak asasinya.¹⁰²

Sekalipun dalam KUHAP sedemikian rupa diupayakan adanya pengaturan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun korban kejahatan, dalam prakteknya jauh dari apa yang diharapkan. Kenyataan tersebut timbul justru berawal dari lemahnya peraturan itu sendiri, yang tidak memberikan pengaturan secara tuntas dan tegas. Sehingga terkesan penonjolan

¹⁰⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan KUHAP*, Dharma Pemuda, Jakarta, 1983, hal.43

¹⁰¹ Subekti, op.cit, hal.4

¹⁰² Andi Hamzah, *Bungai Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986, hal.4

masalah perlindungan hak-hak asasi manusia dalam KUHAP sebagai pengaturan yang bersifat politis.¹⁰³ Sahetapy dalam hal ini mengatakan mengenai KUHAP sebagai berikut :

Tampaknya orang lupa, bahwa KUHAP memiliki dua sisi. Sisi yang satu memang disediakan untuk kepentingan atau kewajiban tersangka atau terdakwa. Namun, pada sisi yang lainnya dari KUHAP, juga harus disimpulkan aturan permainan untuk aparat penegak hukum. Dengan perkataan lain, seluruh aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai pada aparat pengadilan, semua harus tunduk juga pada KUHAP dengan seperangkat ancaman sanksi, agar dengan demikian kesewenang-wenangan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dihindarkan dan terjamin hak asasi manusia.¹⁰⁴

Berlakunya Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan yang dianut melalui undang-undang dimaksud, sudah barang tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir, yang kemudian mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan.¹⁰⁵ Adapun pengaturan saksi dalam hal ini dilihat dalam sub-sub sistem peradilan pidana yaitu : a. tahap penyidikan, b. tahap penuntutan dan c. tahap persidangan.

a. Tahap Penyidikan

¹⁰³ Pujiyono, *Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Pidana sebagai Refleksi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia* (Sebuah Makalah dalam Majalah Hukum FH UNDIP, 1995)

¹⁰⁴ JE. Sahetapy, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bandung, 1992, hal.5

¹⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, 1983, hal.1

Tahapan sebelum dilakukan penyidikan adalah penyelidikan. Pasal 1 butir ke 5 KUHAP menyebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Pengertian penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir ke 2 KUHAP).

Penyelidik adalah bagian yang tidak dipisahkan dari penyidikan, karena ia merupakan salah satu metode dari penyidikan. Penyidik terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang terjadi, sebagai bahan bagi penyidik dalam melanjutkan penyidikan.¹⁰⁶ Menurut **de Pinto** yang dikutip oleh **Mr.Tresna** dalam bukunya Komentaris atas Reglement Hukum Acara Di Dalam pemeriksaan Di muka Pengadilan Negeri atau HIR (1959 :72), pengertian mengusut (penyelidik) ialah pemeriksaan, penahanan, oleh pejabat yang berwenang setelah penyelidik mengetahui/mendengar telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Maksudnya ialah untuk mencari bukti-bukti/unsur sehingga penuntut umum dapat mempertimbangkan bahwa benar-benar telah terjadi

¹⁰⁶ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentaris*, Ghalia Indonesia, 1984, hal.25

pelanggaran hukum.¹⁰⁷ Upaya mengumpulkan bukti ini salah satunya adalah dengan mengumpulkan keterangan saksi.(Pasal 184 ayat 1 KUHAP) Keterangan saksi dalam hal ini dapat dikatakan mempunyai peran dalam penyidikan untuk mengungkapnya terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Pasal 4 KUHAP mengatakan Penyelidik adalah polisi negara Republik Indonesia. Pasal 5 selanjutnya menyebutkan :

(1) Penyelidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan ;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

¹⁰⁷ Ibid., hal.25-26

(2)Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Kewenangan penyelidik dalam menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana ini sangat terkait dengan keberadaan saksi yang mana saksi adalah pihak yang mengetahui terjadinya peristiwa yang terkait dengan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan penyelidik terhadap saksi ini dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana harus diperhatikan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 4 yaitu; Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Saksi dalam hal ini dapat dikatakan mempunyai hak untuk melaporkan terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 108 ayat (1) yang mengatakan ”Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidikan dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”. Selanjutnya saksi juga merupakan suatu kewajiban, yang

mana dapat dilihat dalam ayat (2) yaitu; Setiap orang yang mengetahui permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik maupun penyidik.

Pemeriksaan terhadap saksi harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 112 (1) menyatakan ; Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Pasal 112 ayat (2) menyebutkan ;Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Selanjutnya dikatakan Penjelasan Pasal 112 ayat (1); Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 118 : Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. **Andi Hamzah** dalam hal ini mengatakan dengan berlakunya KUHAP mengakibatkan sistem

pemeriksaan juga mengalami perubahan. Selama ini segala cara dipergunakan untuk memperoleh pengakuan baik dari tersangka/saksi dalam pemeriksaan.¹⁰⁸

b. Tahap Penuntutan

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Pasal 138 ayat (2) selanjutnya menyebutkan ;Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. “Meneliti” yang dimaksud dalam Pasal 138 adalah disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut ; Yang di maksud dengan “meneliti” adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Tindakan penuntut umum dalam meneliti hasil penyidikan penyidik terkait dalam pembuktian dalam persidangan. Pembuktian keterangan saksi adalah perlu karena keterangan saksi sering kali banyak berperan untuk terungkapnya suatu tindak pidana. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan

¹⁰⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Op.Cit., hal.165

penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP). Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka (Pasal 140 ayat 2 huruf d KUHAP). Penjelasan Pasal 140 ayat 2 huruf d KUHAP menyatakan “Alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian atau didapat”. Saksi dalam hal ini dapat dikatakan merupakan salah satu alasan baru untuk dapat diteruskannya penuntutan apabila memang hal tersebut mendukung pembuktian terungkapnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

c. Tahap Persidangan

Pengaturan terhadap saksi dalam proses persidangan perkara pidana adalah dapat dilihat dalam Pasal 159-185 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.(159 ayat (1) KUHAP). Penjelasan Pasal ini mengatakan ;Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi tidak dapat diberikan secara bebas.
- 2) Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak

akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya dalam penjelasannya dikatakan “Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban tiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya ahli”. **Andi Hamzah** dalam hal ini mengatakan “Pada prinsipnya menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang kecuali terhadap mereka yang dikenakan oleh undang-undang untuk menolak menjadi saksi (Pasal 168). Untuk dapat diperiksa sebagai saksi haruslah orang yang benar-benar mengalami sendiri atau didengarnya sendiri ataupun yang dilihatnya sendiri tentang suatu peristiwa pidana.”¹⁰⁹

- 3) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. (Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP)
- 4) Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP)
- 5) Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang

¹⁰⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Loc.Cit., hal.224

diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. (Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP)

- 6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat ke berapa dengan terdakwa atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. (Pasal 160 ayat (2) KUHAP)
- 7) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. (Pasal 160 ayat (3) KUHAP)
- 8) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. (Pasal 160 ayat (4) KUHAP)
- 9) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat

penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.(Pasal 161 ayat (1) KUHAP)

- 10) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. (Pasal 161 ayat (2) KUHAP). Penjelasan Pasal ini menyebutkan; Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. **Andi Hamzah** dalam hal ini mengatakan ; maksud ayat (2) Pasal ini kurang jelas, karena keterangan ahli atau saksi yang tidak mau disumpah atau mengucapkan janji bukan merupakan alat bukti, dan hanya merupakan “keterangan” saja, tidaklah dapat keterangan tersebut untuk menambah keyakinan hakim. Menurut hemat kami keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah dapat dimasukkan dalam kategori “petunjuk” sehingga ia hanya dapat menambah keyakinan hakim.¹¹⁰
- 11) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman, atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. **Andi Hamzah** dalam hal ini mengatakan ; Jika -

¹¹⁰ Ibid., hal.227

keterangan saksi dibacakan karena alasan tertentu ia bukanlah sebagai alat bukti yang termasuk kategori "keterangan saksi" tetapi masuk kategori "petunjuk", kecuali sebelumnya keterangan itu diberikan di bawah sumpah.¹¹¹

- 12) Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. **Andi Hamzah** dalam hal ini berkomentar ; Hakim menanyakan alasan-alasan perbedaan keterangan saksi, jika alasan yang diberikan oleh saksi dapat diterima oleh hakim, maka keterangannya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah tetapi jika alasan yang diberikan saksi tidak diterima hakim mengingatkan atas sumpah yang telah diucapkan dan kemudian saksi akan dituntut memberikan sumpah atau keterangan palsu.¹¹²
- 13) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. (Pasal 164 ayat (1) KUHAP)
- 14) Penuntut umum atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. (Pasal 164 ayat (2) KUHAP)
- 15) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan

¹¹¹ Ibid., hal.228

¹¹² Ibid., hal.229

alasannya.(Pasal 164 ayat (3) KUHAP) Penjelasan Pasal ini menyebutkan; hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasehat hukum, apabila pertanyaan yang diajukan itu tidak ada kaitannya dengan perkara.

- 16) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.(Pasal 165 ayat (1) KUHAP)
- 17) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.(Pasal 165 ayat (4) KUHAP)
- 18) Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.(Pasal 166 KUHAP) Penjelasan Pasal ini mengatakan ; Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang

pengadilan. Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

- 19) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. (Pasal 167 ayat (1) KUHAP). Penjelasan Pasal ini mengatakan; Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, maka ada kalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara ke luar dari sidang selama saksi berikutnya di dengar keterangannya.
- 20) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang. (Pasal 167 ayat (2) KUHAP). Penjelasan pasal ini mengatakan ; Ada kalanya terdakwa atau penuntut umum keberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.
- 21) Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi ;

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. (Pasal 168 KUHP)
- 22) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. (Pasal 169 ayat (1) KUHP). Pasal 169 ayat (2) selanjutnya mengatakan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.
- 23) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (Pasal 170 ayat (1) KUHP). Penjelasan Pasal ini mengatakan ; Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundangan.
- 24) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan tersebut (Pasal 170 ayat (2) KUHP) Penjelasan Pasal ini mengatakan; Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang

dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

- 25) Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :
- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin ;
 - b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.(Pasal 171 KUHAP)
- 26) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal waktu ia tidak hadir.(Pasal 173 KUHAP)
- 27) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang mengingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.(Pasal 174 ayat (1) KUHAP)
- 28) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. (Pasal 174 ayat (2) KUHAP)

- 29) Jika saksi tidak bisa Bahasa Indonesia ditunjukjuru bahasa (Pasal 177), jika bisu tuli dan tidak dapat menulis diangkat penerjemah yang pandai bergaul dengan saksi (Pasal 178ayat (1) KUHAP)
- 30)Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.(Pasal 185 ayat (1) KUHAP)
- 31)Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (Pasal 185 ayat (4) KUHAP)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KEBIJAKAN LEGISLATIF SELAMA INI DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan beberapa tahap :¹¹³

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dilihat sebagai satu kesatuan proses, maka tahap kebijakan pertama yang dapat pula disebut kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis

¹¹³Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDP, Semarang, 2002

pedoman untuk tahap-tahap berikutnya.¹¹⁴ Kebijakan legislatif dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah kebijakan dalam melindungi saksi dalam proses peradilan pidana. Kebijakan legislatif dalam hal ini adalah kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana yang menjadi acuan pertama tama adalah hukum acara pidana karena yang dinamakan saksi adalah terkait dengan proses beracara dalam peradilan pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting dalam proses peradilan pidana hal ini terlihat dengan ditempatkannya keterangan saksi dalam urutan pertama sebagai alat bukti (Pasal 184). Hukum acara pidana yang dimaksud adalah KUHAP.

Perlindungan saksi yang terdapat dalam KUHAP terlihat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

¹¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984 (Tulisan dari Barda Nawawi Arief yang berjudul Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Mengefektifkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda)

- a. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.(Pasal 117 ayat (1))
- b. Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. (Pasal 118 ayat (1))
- c. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.(Pasal 166)
- d. Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.(Pasal 177 ayat (1))
- e. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. (Pasal 178 ayat (1))
- f. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 229 (1))
- g. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim atau pengadilan atas permintaan orang yang dirugikan dapat menetapkan “untuk menggabungkan” perkara

gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksa.(Pasal 98 ayat (1)) Orang yang dirugikan atas perbuatan pidana diantaranya adalah saksi.

Sistem penggabungan ini masih dirasakan kurang mendekati hakekat tujuan ganti rugi itu sendiri. Sebab kalau diperhatikan secara seksama ketentuan pasal-pasal yang mengatur penggabungan tuntutan ganti rugi tersebut, antara lain :¹¹⁵

- tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materiil yang dialami oleh korban atau orang yang dirugikan, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2). Sedang kerugian in materiil harus lagi digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Hal ini berarti untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepenuhnya, orang yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan. Keadaan ini sedikit banyak mengaburkan kembali maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.
- hal lain yang merupakan ganjalan dalam pelaksanaan adalah masalah pembayaran ganti rugi. Oleh KUHAP, tuntutan dan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana yang

¹¹⁵M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, PT.Sarana Bakti Semesta, 1985

bersangkutan. Dengan ketentuan ini, akan selalu dijumpai kekecewaan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut.

Perlindungan terhadap saksi dalam KUHAP ini, mirip perlindungan *in abstracto* atau tidak langsung, walaupun terdapat juga yang bersifat langsung atau *in concreto* atau langsung.¹¹⁶ KUHAP dalam pasal pasal lainnya justru lebih banyak mengatur apa yang wajib saksi lakukan dengan sertai adanya ancaman hukuman seperti :

a. Kewajiban menghadap

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”(Pasal 159 ayat (2)) Penjelasan Pasal 159 ayat (2) menyebutkan ; Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban

¹¹⁶ Meminjam istilah” perlindungan *in abstracto*” yang dikemukakan Barda Nawawi Arief dalam tulisan yang berjudul “Perlindungan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana” dalam buku Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Yang mengatakan ;Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundangan-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”

itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

b. Kewajiban bersumpah

Sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Akan tetapi jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi tersebut memberi keterangan. (Pasal 160)

Riduan Syahrani mengatakan tujuan undang-undang mewajibkan saksi untuk bersumpah atau berjanji sebelum memberi keterangan adalah agar supaya saksi tersebut tidak akan berdusta atau memberi keterangan palsu. Saksi yang beragama dan percaya sepenuhnya akan kekuasaan Tuhan, niscaya merasa takut dikutukNya jika ia berdusta. ¹¹⁷

Saksi yang tanpa alasan yang sah yang menolak bersumpah atau berjanji, dapat disandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Apabila kemudian setelah waktu penyanderaan itu habis dan saksi tersebut tetap tidak mau disumpah dan mengucapkan janji, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan, tetapi keterangan yang diberikan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, namun dapat menguatkan keyakinan hakim. (Pasal 161 dan 185)

¹¹⁷ Riduan Syahrani, Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983, hal.110

c. Kewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sebagai konsekwensi bagi saksi yang telah bersumpah dan berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya, maka ia berkewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu hanya menyatakan apa yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi saja tanpa interpretasi.¹¹⁸

Pasal 163 menyatakan ; Jika keterangan saksi di depan sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. **Riduan Syahrani** mengatakan ; Apabila keterangan saksi di sidang pengadilan disangka palsu, maka hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu. Apabila saksi tersebut tetap pada keterangannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.¹¹⁹

Pengaturan saksi selain di atas adalah mengenai larangan menjadi saksi dalam KUHAP antara lain adalah :

¹¹⁸ Ibid, hal.110

¹¹⁹ Ibid, hal.110-111

a. Pasal 168 menyatakan ; Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- 1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pengecualian dari kewajiban untuk menjadi saksi terhadap mereka yang mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan terdakwa ini, didasarkan kepada suatu pertimbangan, bahwa mereka dikhawatirkan tidak obyektif apabila di dengar sebagai saksi. Akan tetapi kalau mereka itu menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka mereka dapat memberi keterangan di bawah sumpah.(Pasal 169 ayat (1))¹²⁰

Sedangkan anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-

¹²⁰ Ibid, hal.109

kadang ingatannya baik kembali, hanya boleh di periksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, dan keterangan mereka ini hanya dipakai sebagai petunjuk saja (Pasal 171 KUHP). Sebabnya adalah karena mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.¹²¹

- b. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.(Pasal 170 ayat (1))

Kesimpulan yang diperoleh dalam perlindungan saksi dalam KUHP adalah secara implisit ataupun yang mirip secara *in abstracto* dan *in concreto* terlihat dalam Pasal 98 ayat (1), 117 ayat (1), 118 ayat (1), 166, 177 ayat (1), 178 ayat (1) dan 229. Sifat Perlindungan yang di katakan mirip perlindungan *in abstracto* karena sebagai berikut :

- 1) tidak secara jelas menyebut bentuk perlindungan seperti ;
-“keterangan yang diberikan tanpa tekanan dari siapapun”(Pasal 117 ayat(1)
- 2) sifat perlindungan ini melekat dengan apa yang menjadi hak saksi seperti :
-hak ganti rugi biaya transport, bebas dari pertanyaan yang menjerat dan seterusnya.

¹²¹ Ibid, hal.109

- 3) sifat perlindungan ini ditujukan tidak hanya kepada saksi, tapi juga terhadap tersangka terlihat dalam Pasal 117 ayat (1)

Sifat perlindungan mirip perlindungan *in concreto* karena sebagai berikut :

- adanya ganti rugi transport,
- adanya pengabungan gugatan ganti rugi dalam proses pidana.,
- sifat perlindungan nyata seperti pemeriksaan yang tanpa adanya tekanan.

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Latar belakang dikeluarkannya Undang Undang ini dalam pertimbangan antara lain disebutkan ...”bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional; serta bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional:

Tindak pidana ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi, yang pelakunya terkadang sudah terorganisasi sehingga tindak pidana ini dalam pengungkapannya tidak mudah. Peranserta masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana ini sangat membantu aparat untuk mengungkap tindak pidana ini. Peran serta masyarakat dalam Pasal 54 di sebutkan yaitu :

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan /atau dimiliki secara tidak sah.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Undang Undang ini tampaknya membedakan antara saksi dan pelapor. Hal ini tampak dalam Pasal 57 yang menyebutkan ;

- (1) Di depan pengadilan, saksi dan /atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Seorang pelapor berdasar ketentuan diatas bukan atau belum tentu seorang saksi, walaupun seorang pelapor adalah orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana sama dengan pengertiannya atau termasuk dalam pengertian saksi. Seorang pelapor dan kemudian menjadi saksi tentunya menjadi sulit untuk tidak menyebut identitas dirinya sendiri karena dalam pemeriksaan persidangan seorang saksi harus menyebutkan identitasnya dalam menjawab pertanyaan hakim (lihat Pasal 160 ayat (2) KUHAP).

Seorang saksi atau orang lain yang menyebut identitas pelapor diancam pidana. Hal ini terlihat dalam Pasal 66 yang menyebutkan; Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Undang Undang ini tampaknya memperhatikan betapa perlunya peranserta masyarakat untuk dapat mengungkap tindak pidana psikotropika. Wujud peranserta masyarakat ini adalah tampak sebagai seorang pelapor juga sebagai saksi. Perlindungan terhadap mereka dengan jelas disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3), secara tektual disebutkan terhadap pelapor, tidak terhadap saksi sehingga perlindungan terhadap saksi dalam hal ini tidak jelas

pengaturannya walaupun seorang pelapor dapat juga menjadi saksi. Undang Undang ini tidak mengatur dengan tegas antara pelapor dan saksi.

Djoko Budiharjo mengatakan perlindungan saksi dalam tindak pidana psikotropika hanya secara tertulis hanya di tujukan terhadap seorang pelapor tidak sebagai saksi, bahkan seorang yang menjadi saksi jika mengungkap identitas pelapor dapat dikenakan pidana (Pasal 66)

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;

Bagi Indonesia sebagai salah satu peserta dalam penandatanganan konvensi tunggal narkotika tahun 1961 dan konvensi narkotika tahun 1988, keikutsertaannya di dalam pengaturan narkotika secara internasional merupakan perwujudan dari kehendak suatu bangsa yang merdeka dan bercita-cita antara lain ikut menjaga perdamaian abadi di dunia dan sekaligus menunjukkan adanya "*political will*" pemerintah Republik Indonesia terhadap penanggulangan masalah narkotika baik di dalam negeri maupun di dalam percaturan masyarakat internasional.¹²²

Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih sehingga membutuhkan suatu Undang Undang yang sesuai dengan

¹²² Romli Atmasasmita, Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.35

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Hal inilah yang mendasari digantinya Undang Undang No.9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Mengingat kejahatan narkotika dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih maka membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mengungkap kejahatan ini untuk diproses dalam persidangan. Peranserta masyarakat mendapat perhatian dalam Undang Undang No 22 tahun 1997 yaitu dalam Pasal 57 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pemerintah dalam hal ini memberikan penghargaan kepada masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.(Pasal 58)

Undang Undang ini menyebut wujud peranserta masyarakat adalah dengan melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba sebagai pelapor, namun secara tidak langsung seorang pelapor dimungkinkan menjadi seorang saksi. Undang Undang No.22 tahun 1997 dalam Pasal 76 menyebut secara sendiri antara saksi dan pelapor yaitu sebagai berikut :

- (1) Di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Seorang pelapor yang kemudian menjadi saksi sebagaimana dalam UU No.22 tahun 1997 Tentang Narkoba menjadi sulit untuk merahasiakan identitasnya karena menjawab pertanyaan hakim tentang identitasnya sesuai ketentuan dalam Pasal 160 ayat (2) KUHP. Seorang saksi dalam tindak pidana narkoba akan mendapat pidana jika memberi keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 95 yang menyebutkan ; Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Upaya yang secara tidak langsung melindungi saksi dapat dilihat dalam Pasal 92 yang menyebutkan ; Barang siapa tanpa hak melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,-

Ketentuan ini dapat melindungi saksi karena seorang yang menjadi saksi dibutuhkan dalam proses peradilan pidana sebagai alat bukti. Apabila seseorang tidak dapat menjadi saksi maka pengungkapan suatu perkara pidana akan menjadi terhambat.

Pemberian perlindungan saksi dalam undang undang ini sudah diatur yaitu dalam bentuk peranserta masyarakat walau tidak menyebut jelas sebagai saksi dan secara tidak langsung diatur dalam Pasal 92 karena barang siapa yang menghalang halangi seseorang menjadi saksi dapat dimasukan dalam unsur Pasal 92 yaitu menghalangi atau mempersulit pemeriksaan perkara pidana narkotika yang dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,-. Perlindungan saksi dalam hal ini bersifat khusus yaitu hanya untuk yang melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika.

4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Korupsi adalah masalah besar dan ruwet yang menyangkut banyak seginya, banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya. Korupsi itu sendiri adalah merupakan suatu penyakit dalam masyarakat, suatu hal dapat menghambat jalannya pembangunan di negara ini.¹²³ Korupsi di Indonesia sudah membudaya dan melembaga di seluruh lapisan masyarakat serta lembaga negara seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perkembangan korupsi selama 50 tahun bukannya makin berkurang bahkan makin bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya.¹²⁴ **Romly Atmasasmita** menggolongkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang penanggulangannya tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara biasa, tetapi harus dengan cara luar biasa dan khusus.

Penanggulangan tindak pidana korupsi ini membutuhkan dukungan semua pihak pemerintah, aparat hukum dan masyarakatnya. Masyarakat mempunyai peran yang besar dalam ikut menuntaskan kejahatan korupsi ini. Partisipasi langsung masyarakat salah satunya adalah ikut membantu aparat penegak hukum membawa pelaku ke pengadilan. Wujud partisipasi ini yaitu melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui terjadinya tindak

¹²³ K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia, Jakarta, 1983, hal.5

pidana korupsi. Pemerintah tampaknya dalam masalah ini lebih memfokuskan membenahi peraturan perundang-undangan yang mengatur korupsi. Hal ini tampak kebijakan perundangan undangan yang mengatur korupsi mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

- 1) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut)
- 2) Undang Undang No.24/Prp/1960 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang Undang No.3/1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang Undang No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang Undang No.20 /2001 Tentang Perubahan Undang Undang No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peranserta masyarakat sebagai pelapor sudah tampak diperhatikan dalam UU N0.3/1971. Seorang pelapor (kemungkinan dapat menjadi saksi) mempunyai peran yang besar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, sehingga seorang pelapor perlu mendapat perlindungan. Pasal 19 UU No.3/1971 menyebutkan ;(1)Dalam pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor, (2) Pada saat pemeriksaan akan

¹²⁴ Romly Atmasasmita, Pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kompas, 6 April 2001(Sebuah Essay)

dimulai, hakim memberikan peringatan lebih dahulu kepada saksi tentang adanya larangan tersebut dalam ayat (1). Kebijakan untuk melindungi pelapor atau saksi ini terus mendapat perhatian dalam korupsi selanjutnya UU No.31/1999 dan UU No.20/2001.

Larangan penyebutan identitas pelapor juga di tegaskan kembali dalam Pasal 31 UU No.3/1971.

Pasal 41 UU No.31/1999 (Tidak diubah dalam UU No.20/2001)

menyebutkan :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menantaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah juga menghargai peran masyarakat dalam melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam

Pasal 42 UU No.31/1999 (tidak diubah dalam UU No.20/2001) menyebutkan ;

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal ini lebih lanjut mengatakan ; Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Pasal 41 ayat (2) huruf e ke -2 secara jelas menyebut perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, saksi, saksi ahli, namun apabila dilihat Penjelasan Pasal ini terlihat yang dimaksud hanya perlindungan hukum terhadap pelapor. Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf e menyebutkan; Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasar penjelasan pasal ini bentuk perlindungan berupa rasa aman yang ditujukan terhadap pelapor saja, sehingga penjelasan pasal ini malah mempersempit dan membingungkan pengertian perlindungan saksi yang jelas disebut dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e ke 2. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor/pelapor ini dilakukan berdasar peraturan

perundang-undangan yang berlaku, jadi perlindungan hukum terhadap saksi menunjuk peraturan lain. Peraturan mana yang ditunjuk tidak jelas yang mengatur khusus mengenai perlindungan saksi karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam undang undang ini menjadi tidak jelas walaupun menjadi saksi dalam kejahatan korupsi adalah kewajiban kecuali ditentukan lain oleh undang undang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 UU No.3/1971 (kemudian diubah Pasal 35, Pasal 36 UU No.31/1999) yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36 mengatakan; Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan

rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintah yang bersih perlu suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pemerintahan yang bersih ini termasuk didalamnya adalah berjalannya proses peradilan yang jujur dan adil.

Salah satu pertimbangan Undang Undang ini mengatakan ;”bahwa praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya”.

Dalam rangka menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa peranserta masyarakat sangat diperlukan untuk dapat ikut memberikan informasi, saran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yang menyebutkan ;

- (1) Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.

(2) Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan sebagai berikut :

(1) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 5 ini mendapat sanksi sebagai diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan ; Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan perundang-undangan ini termuat di dalamnya adanya perlindungan saksi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan secara tidak langsung Pasal 20 juga merupakan perlindungan terhadap saksi. Kebijakan perlindungan saksi dalam hal ini tujuan dalam rangka mewujudkan suatu pemerintah dengan aparat penyelenggara negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bentuk perlindungan saksi dalam hal ini tidak diatur hanya menyebut adanya perlindungan hukum bagi saksi yang berproses dalam peradilan (Pasal 9 ayat (1) huruf d).

6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ;

Hak Asasi Manusia (*human rights*) yang secara universal diartikan sebagai "*those rights which are inherent in our nature and without*

which we cannot live as human being” oleh masyarakat di dunia, perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan sampai saat inipun hal tersebut masih berlangsung, dengan aneka dimensi yang terkait didalamnya.¹²⁵

Di dalam **Vienna Declaration and Programme of Action (June 1993)** butir E.83 yang mengatur tentang *‘Implementation and monitoring methods’* ditegaskan bahwa pemerintah-pemerintah hendaknya menggabungkan (*incorporate*) standar-standar yang terdapat pada instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional (*domestic legislation*) dan memperkuat pelbagai struktur, lembaga nasional dan organ-organ dalam masyarakat yang memainkan peran di dalam mempromosikan dan melindungi HAM.¹²⁶

Kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya mengikuti kecenderungan dunia Internasional untuk mengatur HAM dalam peraturan perundang undangannya yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Timbulnya kejahatan terhadap HAM seperti kasus di Timor Timur (sekarang telah menjadi negara sendiri), kasus Tanjung Priuk, kasus Abepura di Papua. Tejadinya kejahatan – kejahatan HAM harus diproses di pengadilan, karena pengadilan biasa tidak dapat untuk

¹²⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal.1

¹²⁶ Ibid, hal.11

memproses kejahatan HAM maka dibuatlah kebijakan perundang-undangan tentang peradilan HAM yaitu Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Salah satu pertimbangan dibuatnya Undang Undang ini adalah "bahwa pembentukan Pengadilan HAM yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang Undang, oleh karena itu Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang tersebut perlu dicabut".

Pasal 1 angka ke 1 menyebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Pasal 1 angka 3 menyebutkan ; Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Kejahatan HAM mempunyai beberapa ciri seperti akibat yang ditimbulkan penderitaan bagi korban dan pelakunya dapat dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi atau orang yang mempunyai kekuatan/kekuasaan, sehingga untuk mengungkapnya perlu adanya

partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini perlu mendapat perlindungan. Pasal 34 menyebutkan antara lain sebagai berikut :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud yaitu PP NO.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Pasal 1 angka 1 menyebutkan ; Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 2 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat

sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Pengertian saksi dalam hal ini lebih spesifik yaitu saksi terhadap tindak pidana HAM yang mendapat gangguan.

Adapun yang dimaksud ancaman, gangguan, teror dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 4)

Bentuk perlindungan dalam Pasal 4 disebutkan :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

Perlindungan terhadap saksi di sini dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan yang dilakukan sejak proses penyelidikan sampai pemeriksaan persidangan (Pasal 2 ayat (1))

Akibat yang ditimbulkan pelanggaran HAM diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan yaitu :

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah untuk melindungi saksi dalam pelanggaran HAM lebih baik di bandingkan dengan peraturan perundang undangan lain yang mengatur perlindungan saksi. Kebijakan dalam hal sudah terperinci mengatur hal-hal mengenai siapa yang melindungi, pengertian gangguan terhadap saksi dan bentuk-bentuk perlindungan saksi.

7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Persoalan *money laundering* (pemutihan uang hasil kejahatan), untuk selanjutnya disingkat MLD, selalu menjadi salah satu topik yang mengundang diskusi hangat. Hal ini menunjukkan bahwa jenis tindak pidana ini bukan masalah negara pernegara, tetapi sudah menjadi masalah transnasional dan masalah internasional.¹²⁷

Dipelbagai negara masalah pelaporan MLD ini akan berbenturan dengan kerahasiaan bank terhadap konsumen. Pelanggaran terhadap

konfidensialitas dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Dalam pengaturan tentang MLD, hal ini harus ditegaskan, sebab semua laporan yang didasarkan atas *good faith* tidak merupakan pelanggaran (*immunity of liability*).¹²⁸

Kebijakan penaggulangan tindak pidana MLD ini perlu suatu perundang undangan yang mengaturnya. **Muladi** mengatakan "Politik kriminal (*criminal policy*) yang dapat dikemukakan dalam rangka menghadapi MLD harus dirumuskan secara lengkap, baik yang bersifat nasional maupun non yuridis. Undang Undang Nomor 15 Tahun 20002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam salah satu pertimbangannya huruf d menyebutkan "bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral".

Penanganan tindak pidana MLD yang cukup rumit, maka perlu adanya partisipasi semua pihak untuk dapat mengungkapkannya sampai proses peradilan. Seseorang yang mengetahui terjadinya MLD yang mau melaporkan terjadinya tindak pidana ini sering kali harus dihindangi rasa takut karena pelaku kejahatan MLD ini adalah orang /suatu organisai yang mempunyai kekuatan/kekuasaan, sehingga adalah perlu dilakukan suatu

¹²⁷ Muladi, Ibid, hal.127

¹²⁸ Ibid, hal.135

perlindungan terhadap pihak (saksi) yang mau melaporkan terjadinya tindak pidana MLD.

Adanya perlindungan terhadap saksi dapat dilihat dalam Pasal 39 yang menyebutkan :

- (1) PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 40 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan /atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Seorang saksi dalam hal ini dibedakan dengan pelapor dan terkandung kewajiban saksi untuk tidak menyebut identitas pelapor (Pasal 41 ayat (1)). Seorang saksi secara jelas dikatakan mendapat perlindungan khusus dari negara dalam rangka memberi kesaksian yang dimungkinkan

mendapat ancaman yang membahayakan dirinya atau keluarganya.(Pasal 42 ayat (1))

Pasal 43 juga bersifat melindungi saksi yang mengatakan : Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 40 dan Pasal 42.

Perlindungan saksi dalam perundang undangan ini sudah mendapat perhatian dan secara jelas disebutkan, namun perlindungan saksi ini hanya terhadap saksi dalam tindak pidana pencucian uang.

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Kalau mengingat kembali peristiwa bom Bali terbayang dalam ingatan lebih dari 200 orang tewas dalam peristiwa itu, ini terjadi karena ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yang disebut terorisme. Dampak yang terjadi dari peristiwa ini tidak sedikit antara lain dalam sektor pariwisata mengalami penurunan, industri kecil yang gulung tikar.

Pemerintah tampaknya sangat menaruh perhatian besar terhadap masalah terorisme ini. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) untuk mengatur masalah terorisme. Perpu No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan : Huruf b

menyebutkan”bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan”. Huruf c adalah ; bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional; Huruf d menyebutkan ”bahwa terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme”. Huruf e mengatakan ; bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Tindak Pidana terorisme adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang cara cara yang dilakukan sulit untuk diketahui orang lain. Pelakunya seringkali mempunyai jaringan yang rapi dan luas, sehingga seseorang yang mengetahui terjadinya tindak pidana ini kemungkinan akan merasa ketakutan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Seorang yang mengetahui adanya tindak pidana ini atau seorang saksi dalam hal ini sudah sepatutnya memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 33 menyebutkan ; Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarga dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Selanjutnya Pasal 34 antara lain menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas saksi;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan terhadap saksi dalam Undang Undang ini tampak dalam Pasal 33 dan 34. Pengaturan perlindungan saksi dalam hal ini lebih terperinci dan jelas. Adanya bentuk perlindungan seperti pemberian kerahasiaan identitas, pemeriksaan persidangan tanpa bertatap muka langsung.

Berdasar uraian pengaturan perlindungan saksi diatas yang diatur mulai dari KUHAP sampai Tindak Pidana Terorisme dapat digambarkan secara singkat dalam tabel berikut :

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tabel Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi

No	Undang Undang	Bentuk Perlindungan Saksi	Keterangan
1.	KUHAP	Secara implisit terdapat dalam Pasal 117, 118, 166, 177, 229	Sifat perlindungan saksi masih tidak jelas dan tidak kongkrit.
2.	UU/5/1997 Tentang "Psykotropika"	Sudah ada pengaturan perlindungan saksi walau masih rancu antara Pasal 54 ayat 3 dengan adanya Pasal 57 ayat (1)	Seorang pelapor dibedakan dengan saksi. Perlindungan ditujukan kepada untuk pelapor.
3.	UU/22/1997 Tentang "Narkotika"	Sama pengaturannya dengan UU/5/1999	Perlindungan saksi ini bersifat khusus saksi dalam tindak pidana narkotika.
4.	UU/31/1999 Tentang "Korupsi"	Terdapat aturan perlindungan saksi walau rancu antara Pasal 41 ayat (2) dengan Penjelasan Pasal tersebut.	Terjadi kerancuan antara saksi dan pelapor. Sifat perlindungan saksi hanya untuk tindak pidana korupsi saja.
5.	UU/26/2000 Tentang "HAM"	Perlindungan saksi sudah jelas di atur dalam Pasal 34 dan diatur terperinci dalam PPnya.	Sifat perlindungan saksi hanya khusus dalam tindak pidana HAM
6.	UU/15/2002 Tentang "Pencucian Uang"	Perlindungan saksi sudah ada walau tidak secara langsung dalam Pasal 39, 40, 42 ayat (1), 43	Perlindungan saksi sudah lebih memadai daripada UU sebelumnya, lebih kongkrit.
7.	Perpu/1/2002 Terorisme	Perlindungan saksi sudah jelas diatur dalam Pasal 33, 34	Bentuk perlindungan saksi sudah rinci walau hanya terhadap saksi tindak pidana ini.
8.	UU/28/1999 Tentang "KKN"	Ada perlindungan Saksi (Pasal 8), namun tidak ada bentuk kongkrit perlindungan	Perlindungan ditujukan kepada tindak pidana dalam UU ini.

B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA SELAMA INI

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi Dalam KUHAP

Secara umum ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap saksi adalah KUHAP. Pelaksanaan dari ketentuan KUHAP dapat dibedakan secara garis besar sebagai berikut :

a. Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan aparat penegak hukum yang paling dominan adalah Polisi, di samping terdapat pula penyidik-penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain berdasar Undang Undang tertentu. **Yahya Harahap** mengatakan Polri menduduki posisi aparat "penegak hukum" sesuai dengan prinsip "diferensiasi fungsional" yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan "peran" (*role*) berupa "kekuasaan umum menangani kriminal" (*general policing authority in criminal mater*) di seluruh wilayah negara. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan "kontrol kriminal" (*crime control*) dalam bentuk : "investigasi-penangkapan-penahanan-pengeledahan-penyitaan." Juga sesuai dengan "otoritas kepolisian" itu, semestinya Polri harus mengembangkan "peran pelayanan" atau *civil service*. Diantara fungsi "pelayanan polisi" yang perlu dikembangkan saat ini, antara lain : "mengatur lalu lintas-mengotrol keributan-memberi pertolongan medis

dalam keadaan darurat (*emergency medical care*)-pengaturan jam malam.¹²⁹

Sebagai penyelidik/penyidik Polisi mempunyai kewenangan yang di atur dalam Pasal 5 dan 7 KUHP yang di antaranya adalah dalam menerima laporan atau pengaduan. Laporan atau pengaduan dilakukan oleh yang berhak yaitu (Pasal 108 KUHP) :

- setiap orang yang mengetahui permukatan jahat untuk menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik.
- setiap orang yang mengetahui permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Adapun bentuk laporan atau pengaduan dalam Pasal 108 ayat (1), (4), (5) dan (6) adalah :

- dapat dilakukan dengan lisan, atau.

¹²⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi ke-2, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.91-92

- dilakukan dengan tulisan. Laporan atau pengaduan ini dapat pula menjadi hak dan juga dapat menjadi kewajiban saksi.

Kewenangan yang dimiliki penyelidik/penyidik dalam memanggil seorang saksi seringkali tidak dilakukan hati-hati dan teliti.

Yahya Harahap mengatakan "Pengalaman cukup memberi kenyataan, berapa banyak orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, padahal orang itu sudah menjelaskan sama sekali tidak mengetahui peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Kadang-kadang seorang saksi bolak-balik berulang-ulang diperiksa, hanya untuk pertanyaan yang itu juga, sehingga sering didengar bagaimana jengkel seorang kalau dipanggil sebagai saksi, yang bersangkutan dapat membayangkan akan terjadi pengalaman cara pemeriksaan yang tidak berujung pangkal, di samping cara pelayanan yang tidak manusiawi. Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26, harus :

- seorang yang mendengar sendiri,
- melihat sendiri,
- mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan

- orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.¹³⁰

Menurut **Andrianus Meliana** sebagaimana dikutip oleh **Indriyanto Seno adji**, bahwa posisi saksi sebagai pihak ketiga yang diinterogasi polisi di Indonesia, mirip “kucing basah yang tak punya daya sama sekali” Kadangkala penolakan suatu Berita Acara penyidikan dengan alasan adanya pemeriksaan secara kekekerasan dan penyiksaan terhadap saksi dianggap sebagai taktik biasa. Situasi ini dimanfaatkan oleh polisi untuk mendapatkan pengakuan saksi dengan cara apapun. Apabila polisi telah memiliki skenario yang kuat mengenai apa dan siapa dibalik suatu kasus atau sebaliknya tidak memiliki skenario apapun tentang suatu kasus, maka terbuka kemungkinan untuk “rekayasa pengakuan” (*fabrical confession*)¹³¹

Pelaksanaan Pasal 117 ayat(1) dan Pasal 118 ayat(1) tentang keterangan yang berikan tanpa tekanan sering kali di ambikan oleh penyidik, perlindungan saksi dalam pelaksanaanya belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Tahap Penuntutan dan Persidangan

¹³⁰ Ibid, hal.125

¹³¹ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam Perpektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal.35

Tahap penuntutan aparat yang berkompeten dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 menyebutkan "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan." Kejaksaan adalah lembaga pemerintah dengan demikian adalah merupakan eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif. Melaksanakan kekuasaan negara dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.¹³²

Hal-hal di atas perlu dipahami untuk diketahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara. Itulah sebabnya Pimpinan Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu presiden selaku Kepala pemerintahan melainkan Presiden selaku Kepala Negara.¹³³

Sebetulnya pangkal mula ketidakmandirian Jaksa berawal dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana kejaksaan menjadi Departemen dan Jaksa Agung menjadi Menteri. Pada saat itu menurut **Moch. Soegiharto**, muncullah intervensi dari pemerintah/eksekutif. Muncul lembaga panca tunggal yang sekarang menjadi Musyawarah

¹³²Ledeng Marpaung, obcit.hal.176

¹³³Ibid.hal.177

Pimpinan Daerah (Muspida) dan pada akhirnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu dipandang menjadi perlu dimusyawarahkan, satu hal yang belum pernah diatur dalam undang-undang manapun.¹³⁴

Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, untuk Indonesia indepedensi yang dipersoalkan selalu dikaitkan dengan "*Indepedensi from the government.*" Salah satu hal yang diketengahkan kejaksaan adalah bahwa mereka tidak independen dari eksekutif, karena merupakan "lembaga" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU NO.5 Th 1991. Pasal 6 ayat (1) ini menentukan pula bahwasannya susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian sebagai bagian dari pemerintah (dalam arti sempit) maka Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden, demikian bunyi Pasal 19. Sebagai konsekuensi dari pasal-pasal tersebut tentunya lembaga kejaksaan termasuk Jaksa Agung sepenuhnya tunduk pada Presiden.¹³⁵

Andi Hamzah dalam hal ini menyatakan Undang Undang yang menempatkan Kejaksaan sebagai "alat Pemerintah" harus segera diganti

¹³⁴ Moch. Soegiarto, Kejaksaan Yang Mandiri, Kompas tanggal 22-7-1999.

¹³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Menyoal Indepedensi Kejaksaan Agung, Beberapa Catatan Pemikiran, Makalah, Jakarta, hal.15

dengan undang-undang baru sesuai dengan jiwa UUD 1945, yang Kejaksaan dan Jaksa Agung yang berada dipuncaknya menjadi bagian yang menempel pada Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang idependen tidak dicampuri oleh eksekutif.¹³⁶

Tugas dan kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan yaitu :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan atau penyidikan pembantu.
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat

¹³⁶ Andi Hamzah, Posisi Kejaksaan dan Sistem Ketatanegaraan RI, Seminar Hari Bakti Adyaksa, Makalah, Jakarta, 20 Juli 2000

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. melakukan penuntutan.
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Sebagai Jaksa yang menerima berkas perkara dari polisi sebagai penyidik Jaksa hanya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi jika Jaksa menyatakan penyidik sudah optimal melakukan penyidikan, namun belum memenuhi keinginan Jaksa sehingga dilakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan Tambahan hanya dilakukan terhadap saksi. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan ini berdasar ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No.5 Th 1991 yang menyebutkan "Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal , hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-

lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Sedang mengenai cara pemanggilan dan tanda penerimaan surat pemanggilan yang diatur terhadap terdakwa. Sekalipun undang-undang tidak menyebut secara tegas semua ketentuan pemanggilan yang berlaku terhadap terdakwa, diperlukan juga terhadap saksi. Dengan demikian penuntut umum harus menyampaikan surat panggilan terhadap saksi di alamat tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145. Tidak ada perbedaan tatacara dan pelaksanaan pemanggilan yang berlaku baik terhadap terdakwa maupun saksi.

Penuntut Umum perlu mengingatkan saksi agar benar-benar menyadari perlunya saksi mengerti dan mengetahui :¹³⁷

- untuk apa dia dipanggil menghadap persidangan

Maksudnya orang yang dipanggil penuntut umum sebagai saksi, harus benar-benar tahu kedudukannya dalam panggilan dan pemeriksaan persidangan harus dengan jelas dan tegas disebut bahwa ia dipanggil adalah untuk menjadi saksi. Jangan panggilan tersebut kabur. Tidak dijelaskan apakah dia dipanggil untuk menjadi saksi atau terdakwa. Cara-cara pemanggilan yang kabur seperti sering kita alami pada masa lalu. Yang mengakibatkan kegelasahan dan ketidakpastian terhadap seorang saksi berisi :

¹³⁷ Yushar Yahya, Peraturan dan Petunjuk Pra Penuntutan (Sebuah Diktat Pedoman Bagi Jaksa), Jakarta, 28 Mei 2002

datang menghadap sidang pengadilan pada hari dan tanggal sekian dalam perkara kejahatan Pasal 374 (penipuan). Pemanggilan seperti ini tidak jelas untuk apa seorang dipanggil. Bisa berarti sebagai terdakwa atau juga sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini jelas menimbulkan ketidakpastian bagi seorang saksi.

- menegaskan bahwa seorang saksi yang dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan disidang pengadilan, kepada saksi diberitahukan dengan untuk apa dia dipanggil. Karena itu pada surat panggilan harus ditegaskan dengan jelas, kehadiran pada persidangan tiada lain akan menjadi saksi dalam perkara itu sendiri maupun untuk kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri maupun untuk kepentingan kejiwaan dan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi saksi. Dengan penegasan tadi, sejak panggilan disampaikan kepadanya, saksi sudah mempersiapkan mengenai keterangan yang akan diberikan nanti dalam persidangan tentang apa saja yang dilihat, didengar atau dialami sendiri sehubungan dengan perkara yang akan diperiksa. Dengan adanya penegasan yang diberikan kepada saksi, akan menghindari dari sakwasangka dan kekhawatiran, serta memberi kepastian hukum kepadanya tentang kedudukannya dalam perkara yang bersangkutan. Jaksa Penuntut Umum dalam rangka memberi

perlindungan terhadap saksi yang dapat dilakukan adalah memberitahukan hak-hak apa yang dimiliki saksi yaitu :

- menerangkan ketentuan hukum yang ada secara maksimal.
- kembangkan yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum, dengan cara :

1. memberitahu secara dini akan hak-haknya.
2. menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan pidananya.
3. lakukan pendekatan dengan hakim untuk persepsi yang sama.
4. Barang bukti alat bukti mata pencarian korban sebagai saksi dapat dipinjam pakai.
5. bila pidana percobaan patut diberikan sesuai pasal 14 C KUHP, cantumkan kewajiban membayar ganti kerugian sebagai syarat khusus.
6. libatkan badan-badan sosial untuk pemulihan kerugian yang diderita.

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHP hak-hak yang dimiliki saksi atau korban adalah:

- gugatan ganti kerugian yang diderita.
- mengajukan praperadilan atas SP3 DIK/TUT.

Yahya Harapap mencontohkan sebagai berikut ; Seorang supir yang menabrak seseorang yang berakibat memerlukan operasi. Taksiran

biaya yang perlu dikeluarkan sebesar satu juta sebagai kerugian materiil yang nyata yang mesti dikeluarkan oleh korban. Ternyata sang korban itu sendiri orang miskin, sehingga operasi tertunda. Kita bertanya, apakah seseorang supir dapat membayar ganti kerugian sebesar satu juta? Pada umumnya tidak! Kalau begitu tuntutan ganti kerugian itu percuma jadinya, jika ganti kerugian baru efektif jika pembayaran dibebankan kepada negara. Dalam arti, negara mengambil alih pembayaran tersebut kepada korban atau kepada orang yang dirugikan, dan nanti negara akan meminta pembayaran itu kembali dari terdakwa/terpidana dengan jalan “reimburse”. Dengan sistem ini, pada saat jatuhnya putusan ganti kerugian, korban atau orang yang dirugikan akan segera dapat menerima pembayaran ganti kerugian.

Murtiningsih mengatakan ; Dalam pelaksanaan perlindungan saksi yang tentang penggantian biaya karena memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan (Pasal 229 ayat (1) prakteknya tidak terlaksana dengan baik. Demikian penggabungan ganti rugi dalam Pasal 98 ayat (1) jarang terjadi dalam praktek dipersidangan. Penuntut Umum terkadang dalam kondisi tertentu memberi ongkos transport kepada saksi.¹³⁸

¹³⁸ MurtiNingsih, Wawancara Pribadi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Jaktim, tanggal 12 Agustus 2003

2. Pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dalam Undang Undang Narkotika dan Psikotropika

Berdasar penelitian yang dilakukan, dalam tindak pidana psikotropika/narkotika sangat jarang sekali seorang saksi membutuhkan perlindungan karena yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini adalah seorang polisi yang menangkap pelaku. Aparat yang menjadi saksi dalam persidangan seringkali kesaksiannya dibacakan karena saksi sudah di sumpah lebih dulu di Penyidik. Kendala dalam masalah kesaksian ini adalah tidak terungkapnya jaringan dari kejahatan psikotropika/narkotika. Keterbatasan saksi yang seringkali berasal dari aparat sendiri sehingga menjadi permasalahan jika aparat sendiri terlibat dengan tindak pidana psikotropika ini. **Luhur Istifar** mengatakan ; Peran serta masyarakat dalam mengungkap tindak pidana psikotropika/narkotika hanya sebatas sebagai pelapor, jarang sekali mereka menjadi saksi dalam persidangan. Polisi sering kali dalam mengungkap tindak pidana ini dengan cara bekerja sama dengan orang-orang tertentu yang sengaja menjadi pemberi informasi bagi polisi. Praktek dalam penyidikan sampai penuntutan/persidangan adalah sangat jarang seorang saksi memerlukan perlindungan. Ketentuan ancaman pidana bagi pihak penghambat seorang saksi untuk memberi kesaksian yang di atur Pasal 92 UU No.22 Th 1997 sangat jarang dikenakan untuk melindungi saksi. Prakteknya tidak pernah seseorang sampai diproses sampai ke pengadilan karena melanggar Pasal 92 UU No.22 Th 1997 yaitu

menghambat /menghalangi/mempersulit seseorang menjadi saksi, karena berbagai alasan seperti kesulitan pembuktian, tidak adanya pengaduan/laporan, tidak populer¹³⁹ Gembira Tarigan (Saksi dari anggota Polres Metro Jakarta Timur) mengatakan sering kali dalam mengungkap adanya tindak pidana narkotika/psikotropika adalah berdasar informasi dari masyarakat, saksi selama ini melindungi identitas dari pelapor. Saksi karena kesibukannya dan berpindah tugas maka kesaksiannya di persidangan hanya di bacakan karena saksi telah di sumpah di depan penyidik.¹⁴⁰

3. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi banyak perkara korupsi yang tidak diproses sampai ke pengadilan yang disebabkan salah satunya keenganan mereka yang sebagai saksi tidak melaporkan kepada aparat yang berwenang. Pemeriksaan saksi dalam penyelidikan/penyidikan dilakukan oleh Penyelidik/Penyidik dari Polisi maupun dari Kejaksaan. Laporan seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi seringkali malah menjadi tanggungan orang tersebut untuk

¹³⁹ Luhur Istifar, Wawancara Pribadi dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 3 Maret 2003

¹⁴⁰ Gembira Tarigan, Wawancara Pribadi dengan Aparat Pinyidik Polres Jakarta Timur, tanggal 11 Agustus 2003

dapat mengungkap tindak pidana korupsi ini. Orang ini karena ketentuan undang-undang dapat menjadi saksi, padahal menjadi saksi banyak kerugian yang di alami seperti waktu, biaya, namun timbal balik yang sebagai ganti tidak sepadan. Prakteknya peran serta masyarakat yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi mendapat penghargaan tidak pernah terjadi.¹⁴¹ Contoh kasus Endin Wahyudin yang ingin mengungkap kebobrokan aparat penegak hukum yaitu hakim malah di proses lebih dulu perkaranya dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Kasusnya yaitu Endin yang menjadi saksi dan sekaligus pelapor (setidaknya demikian rumusan yang dijumpai dalam Pasal 31 UU No.31 Tahun 1999), hanyalah satu dari sekian kasus yang diekspos oleh media massa, itupun karena adanya dugaan keterlibatan Hakim Agung. Endin yang merasa telah memberikan sejumlah uang kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkaranya memang kemudian dimenangkan dalam perkara yang diwakilinya tersebut. Akan tetapi, karena keputusan Hakim tidak dapat dilaksanakan, kekecewaannya ditumpahkan melalui suatu surat yang ditujukan pada Majelis tersebut. TGTPK yang baru saja dibentuk saat itu, melalui ketuanya, meyakinkan Endin bahwa ia akan dilindungi dan tidak akan dituntut. Janji yang kemudian diperkuat oleh Maklumat Jaksa Agung

¹⁴¹ Puji Rahayu, Wawancara Pribadi dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 3 Maret 2003

Marzuki Darusman.¹⁴² Bentuk perlindungan saksi dalam hal ini tampak hanya berupa ucapan lesan yang tidak di dukung tindakan kongkrit, sehingga dalam kasus Endin ini yang sebagai saksi dan pelapor justru dipidana dengan sangkaan lain.

4. Pelaksanaan Kebijakan perlindungan Saksi Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Perlindungan Saksi dalam tindak pidana yang Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara efektif sampai kini belum pernah terjadi. Hal ini terjadi karena tidak pernah terjadi tindak pidana yang di atur dalam Undang Undang ini yang diproses sampai ke Pengadilan. Tidak pernah terjadinya tindak pidana ini salah satunya karena kurang adanya peranserta masyarakat dalam memberikan informasi dan kurangnya bukti yang dimiliki aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang di atur dalam Undang Undang ini. Lemahnya kedudukan antara masyarakat (saksi) dengan Aparat Penyelenggara Negara juga merupakan faktor sulitnya mengungkap tindak pidana dalam Undang Undang ini.¹⁴³

¹⁴² Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan (Tulisan Harkristuti Harkrisnowo berjudul Endin: Pencemaran Nama Baik dan Perlindungan Saksi), Le IP 1, edisi 1, 2002

¹⁴³ Budi Santoso, Wawancara Pribadi tanggal 10 Agustus 2003, Jaksa Pada Kejari Jakarta Timur,.

5. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM

Selama ini banyak pihak yang menjadi saksi tindak pidana pelanggaran HAM tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Pada masa Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura di Irian Jaya, dimana dari 105 korban yang ditemui KPPHAM secara fisik para korban tidak dapat berjalan, tiga diantaranya tewas, sebagian besar dipukul mengalami pendarahan, sakit, kurang pendengaran.¹⁴⁴ **Hasballah M.Said** mengatakan partisipasi saksi dalam pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia memang amat menentukan. Selain keenganan, tidak jarang saksi tidak bersedia memberi keterangan maupun hadir di pengadilan karena ketakutan dan merasa jiwanya terancam. Bahkan diindikasikan ada saksi yang sengaja di ancam, diteror, maupun sengaja dihilangkan oleh pihak pihak tertentu. Beberapa kasus lain yang berindikasikan pelanggaran HAM berat (*grooss violation human rights*) belum dapat diselesaikan, karena sejumlah orang yang telah memberikan informasi berkenaan dengan kasus tersebut diancam dan diteror.¹⁴⁵ **Azhar Muchlis** mencontohkan kasus Penggaran HAM di Aceh,

¹⁴⁴ Kompas, 3 April 2001

¹⁴⁵ Indo Hukum, 15 Oktober 2000

TimTim, Ambom yang belum terungkap salah satunya penyebabnya tidak adanya atau kurangnya informasi yang didapat dari saksi dan korban.¹⁴⁶ Adanya bukti contoh kasus di atas membuktikan pelaksanaan perlindungan saksi yang diatur dalam Pasal 34 UU No.26 Th 2000 dengan Peraturan Pelaksanaanya PP No.2 Th 2002 belum dapat memberikan perlindungan terhadap saksi. Saksi yang membutuhkan perlindungan sering kali melapor kepada Komnas HAM, seperti kasus Tanjung Priuk.

6. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengingat masih relatif baru peraturan perundang-undangan ini pelaksanaan perlindungan saksi belum dapat di ketahui pelaksanaanya, karena belum adanya/banyaknya tindak pidana yang terjadi yang berhasil diproses sampai di pengadilan. Namun demikian masih terjadi kendala dalam perlindungan saksi dalam tindak pidana ini. **Reda Manthovani** mengatakan perlindungan saksi memang sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ini, karena keterlibatan dan ancaman dari organisasi kejahatan didalamnya sangat memungkinkan oleh karena itu diperlukan bagi saksi dan pelapor, namun bagaimana jika pelapor atau saksi tersebut mempunyai itikad yang tidak baik dan melaporkan hal-

¹⁴⁶ Anzhar Muchlis, Op.cit.hal.1

hal yang tidak benar, apakah sipelapor atau saksi jenis ini tetap harus mendapat perlindungan baik secara perdata maupun pidana.¹⁴⁷

7. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme

Selama ini berdasar penelitian penulis dari berita dalam media masa saksi banyak memperoleh pengawalan yang ketat dari aparat yang berwenang. Selama ini belum pernah terjadi adanya tekanan, ataupun teror dari pelaku terhadap saksi. Namun yang masih terjadi adalah tindakan aparat penyidik/aparat keamanan yang dalam melakukan penyidikan/penyelidikan masih terjadi, di mana penyidik masih sulit membedakan saksi dengan tersangka.

8. Permasalahan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui alasan keenganan seseorang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1) Tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib

Proses berjalannya peradilan pidana adalah pertama pada tingkat penyidikan. Pada tingkat penyidikan ini di dahului dengan proses

¹⁴⁷ Reda Manthovani, Hambatan Yang Akan Muncul Dalam Penangan TP.Pencucian Uang dan Pola Kerjasama antar Instansi yang Komprehensif (Suatu Makalah), Jakarta Mei 2003

penyelidikan. Pengertian penyelidikan yang di atur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah “serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi ; mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain ”mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹⁴⁸ Laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan ini mempunyai peranan penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

Masyarakat sebagai pihak yang ingin melapor adanya tindak pidana kepada penyidik (polisi pada umumnya) seringkali merasa enggan berhubungan dengan aparat penegak hukum (polisi) dikarenakan adanya alasan alasan tertentu. Ungkapan-ungkapan Polisi sahabat anak, Polisi melayani masyarakat, tetapi dalam keadaan lain dimana mereka

¹⁴⁸ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992

dihadapkan pada suatu konflik atau keadaan yang menyangkut kelembagaan, dia nampak tidak ramah lagi (berubah dratis).¹⁴⁹ Suwarjan seorang saksi mengatakan ketika melaporkan terjadinya pencurian sepeda motor di tempat ia bekerja mendapat perlakuan oleh penyidik dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan seolah-olah ia sebagai tersangka dan bahkan dalam memeriksa saksi korban pihak penyidik seolah-olah mengharuskan adanya “biaya” untuk operasional dalam mencari tersangka.¹⁵⁰

2) Takut mendapat ancaman Pihak lain/Takut mendapat aib

Heri Setiawan seorang polisi (reserse) dari Polsek Semarang Timur mengatakan pihaknya secara lesan sering kali mendapat permintaan perlindungan keamanan dari para saksi atau saksi korban dari tindak pidana tertentu seperti tindak pidana dengan kekerasan seperti pengeroyokan, pembunuhan, penganiayaan. Saksi dalam hal ini merasa takut untuk bertemu dengan pelaku juga terkadang mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang tidak ingin kasusnya diteruskan ke pengadilan.

Saksi korban dalam tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan sering kali takut untuk melapor pada pihak yang berwajib karena merasa malu terhadap masyarakat yang dianggap merupakan aib.

¹⁴⁹ Al.Wisnubroto, Lembaga dan Pranata Hukum Dalam Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, Wisnu Siswacarita-Press, 1995, hal.8

¹⁵⁰ Suwarjan, Wawancara Pribadi, Seorang saksi yang berkerja di RSB Bahagia Semarang, (6 Januari 2003)

- Masyarakat sendiri terkadang seperti menyalahkan pihak yang sebagai korban karena tidak bisa menjaga diri.

3) Tidak adanya jaminan keamanan

Kerjasama dan partisipasi saksi korban memainkan peran yang penting dalam pengungkapan kebenaran dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelakunya. Akan tetapi dalam banyak kasus kekerasan, saksi dan korban cenderung enggan untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi karena tidak adanya jaminan keamanan dan jaminan akan hasil persidangan yang menjunjung keadilan.

Di samping itu terdapat kendala-kendala saksi dalam tahap penuntutan atau persidangan adalah sebagai berikut :¹⁵¹

- 1) Seorang saksi yang telah diperiksa oleh penyidik ketika dalam persidangan mencabut semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan karena adanya tekanan dari penyidik selama ini sangat jarang mendapat perhatian dari Hakim, bahkan sebaliknya tidak jarang mereka malah dianggap memberi keterangan yang tidak benar. Saksi bahkan dapat diancam dengan pidana karena melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu atau sumpah palsu. Banyak kasus yang di muat di media masa yang para saksi mencabut BAP seperti kasus Marsinah, kasusnya saksi

¹⁵¹ Dr.Sopian, Wawancara Pribadi dengan Saksi dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, tanggal 10 Mei 2003

dalam sidang Tomy Suharto dalam perkara pembunuhan Hakim Agung Safiudin.

- 2) Saksi dalam proses peradilan hanyalah merupakan obyek pemeriksaan sehingga hak-hak saksi sangat terbatas bahkan lebih banyak kewajiban yang harus dilakukan saksi.
- 3) Hak-hak Saksi dalam praktek tidak dipenuhi, seperti tidak diberikan uang biaya pengganti untuk datang ke pengadilan.
- 4) Saksi banyak menderita kerugian kehilangan waktu karena datang ke persidangan seperti jam sidang yang tidak tepat sehingga harus menunggu lama bahkan dapat juga tanpa sebab yang jelas sidang ditunda.

Adapun bentuk perlindungan yang menjadi kebutuhan dalam rangka menjadi saksi dalam proses peradilan pidana adalah sebagai berikut :¹⁵²

- a. jaminan memperoleh keamanan dalam rangka memberi kesaksian
- b. ganti rugi atas kerugian yang terjadi karena kesaksian yang diberikan dalam proses peradilan.
- c. Perlakuan yang manusiawi dari aparat penegak hukum.
- d. Bentuk perlindungan pengaturan yang berimbang antara hak dan kewajiban dan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Seperti yang diperlukan adalah hak disembunyikan identitasnya, dapat tidak menghadiri persidangan.

¹⁵² Harkristuti Harkrisnowo dkk, "Laporan Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Saksi", Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ICW, Jakarta, 1999

C. KEBIJAKAN LEGISLATIF UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI MASA MENDATANG

Dari ketentuan yang ada yang berlaku, perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ide dasar perlindungan saksi adalah mempermudah, memperlancar jalannya proses peradilan pidana dengan memberi rasa aman saksi dalam memberikan kesaksiannya. Kebijakan pemerintah cenderung mengatur perlindungan saksi dalam suatu perundang-undangan tersendiri, walaupun saksi sangat terkait dengan proses hukum acara. Kebijakan Perlindungan Saksi ke depan dapat dimaklumi dengan menempatkan dalam suatu peraturan perundangan tersendiri yang di dalamnya terdapat ketentuan formil dan materiil. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan selama ini dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebelumnya secara terpisah dan tidak langsung sudah ada aturan perlindungan saksi. Pelaksanaan perlindungan saksi selama ini belum berjalan optimal. Pemerintah menganggap perlu suatu aturan yang lebih komprehensif yang memberi perlindungan terhadap saksi, dengan maksud terciptanya suatu proses peradilan yang jujur dan adil dalam rangka mencari kebenaran materiil. Hal ini tampaknya mendorong sebagian besar para pemerhati hukum untuk

mengaturnya dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam penelitian ini mencoba mengupas Rancangan Peraturan Perlindungan Saksi yang telah ada yang berupa Draf yang masih diproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya di sebut RUU

1. Dalam RUU terdapat hak yang diperoleh saksi sebagai berikut :
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis.
 - b. memilih bentuk perlindungan
 - c. mendapatkan nasehat hukum
 - d. memberi keterangan tanpa tekanan
 - e. mendapatkan penerjemah
 - f. bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - g. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
 - h. mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan
 - i. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
 - j. mendapatkan identintas baru
 - k. mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi)
 - l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.

Hak-hak ini diberikan pula kepada keluarga Saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.(Pasal 5 ayat (2)). Jadi hak-hak ini memerlukan syarat untuk dapat diberikan kepada Saksi, tidak semua orang yang menjadi saksi memperoleh

hak-hak tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai keputusan untuk dapat memberikan hak-hak tersebut atau tidak. RUU ini tidak lebih lanjut mengatur syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak-hak dalam Pasal 5 ayat (1). Hak-hak apabila direalisasikan akan membutuhkan anggaran yang cukup besar bagi pemerintah seperti terdapatnya pilihan bentuk keamanan sesuai keinginan saksi, bantuan nasehat hukum, tempat relokasi baru, sehingga perlu di kaji antara biaya yang dibutuhkan dan hasil yang diperoleh.

2. Hak yang dapat diajukan saksi ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berupa (Pasal 7 ayat (1)) :

- a. hak atas kompensasi dalam tindak pidana kekerasan yang berat.
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan ; keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan ini belum menyelesaikan masalah mengenai ganti rugi karena dalam ayat (2) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ganti rugi ini menjadi masalah apabila pelaku orang tidak mampu memenuhi tuntutan ganti rugi, maka seyogyanya ganti rugi akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa diganti oleh negara lalu negara dapat memintanya dari pelaku tindak pidana.

3. Seorang saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di

pengadilan tempat di mana perkara tersebut sedang diperiksa.(Pasal 9 ayat (1)). Selanjutnya ayat (2) menyebutkan ; Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Selanjutnya ayat (3) mengatakan ; Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penjelasan Pasal ini menyebutkan ;Yang dimaksud dengan ancaman sangat berat dalam ayat ini adalah ancaman yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam ayat ini adalah pejabat kepolisian, kejaksaan, dan hakim atau Notaris. Ketentuan Pasal ini belum menjelaskan kriteria apa keadaan yang dirasa saksi yang merupakan ancaman sehingga tidak dapat datang ke pengadilan.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.(Pasal 1 butir ke-5)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mempunyai tugas yang berat karena harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka memberi perlindungan terhadap saksi. Pembentukan lembaga ini sangat membutuhkan anggaran sehingga perlu diperhatikan kemampuan anggaran

- pemerintah, mengingat pada masa-masa sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga baru yang tumbuh berkembang karena perkembangan jaman.
5. Tindak Pidana yang bertujuan untuk melindungi saksi ada beberapa macam yaitu sebagai berikut :
- a. Setiap orang yang dengan sengaja memaksa baik memakai kekerasan maupun cara-cara tertentu untuk memaksakan kehendaknya, supaya saksi tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)(Pasal 25 ayat (1))
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dengan cara-cara apapun supaya saksi tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)(Pasal 26 (1))
 - c. Setiap orang yang melakukan pemaksaan atau kekerasan yang berakibat luka berat pada saksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan /atau denda Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)(Pasal 25 ayat (2))
 - d. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan saksi atau keluarganya kehilangan pekerjaan oleh karena saksi tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)(Pasal 27).

- e. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan dirugikan atau dikurangnya hak-hak saksi disebabkan saksi memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).(Pasal 28).
 - f. Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan keberadaan saksi yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Pasal 29).
 - g. Dalam tindak pidana ini terdapat pemberatan jika dilakukan oleh Pejabat Publik seperti dalam Pasal 25, 26, 29 dengan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
6. Yang menjadi ide dasar dalam RUU ini terlihat dalam Pasal 4 yang menyebutkan ; Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan. Ide dasar dari RUU ini terlihat sangat sempit dan sederhana sekali yaitu hanya mencakup segi fisik memberi rasa aman dalam memberikan kesaksian. Menurut penulis ide dasar ini terlalu sederhana, karena perlindungan saksi itu seyogyanya adalah dalam rangka mempermudah, memperlancar jalannya proses peradilan untuk mewujudkan kebenaran materiil yang adil dengan cara memberi rasa aman dalam memberi kesaksian. Rasa aman dalam

memberikan kesaksian ini hanya ditujukan dalam rangka mempermudah, memperlancar jalannya proses peradilan.

Beberapa permasalahan menurut peneliti dalam ketentuan pidana dalam RUU ini adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana dalam RUU ini tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek apabila ketentuan dalam Pasal ini tidak secara tegas mengaturnya, karena ketentuan buku I aturan umum KUHP masih berlaku jika dalam undang-undang tersebut secara tegas mengaturnya. Pengaturan percobaan antara kejahatan dan pelanggaran dibedakan.
- b. Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan..."cara-cara tertentu" untuk memaksakan kehendaknya... dapat ditafsirkan sangat luas.
- c. Pasal 28 menyebutkan..."menyebabkan kerugian"... dapat juga dtafsirkan luas.

Perlindungan terhadap saksi menurut beberapa ahli/sarjana hukum terdapat sejumlah pendapat mengenai perlunya perlindungan saksi :

1) Ifdhal Kasim

Pemerintah harus mengalokasikan dana yang memadai untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Perlindungan saksi itu harus dimulai sejak pemeriksaan awal dilakukan dan bukan hanya sebatas saat pengadilan digelar. Hal itu dikatakannya sebagai Direktur Eksekutif Lembaga

Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam acara Workshop Pengadilan HAM untuk Jurnalis, Kamis (28/2). "Dana itu besar jumlahnya kalau memang pemerintah mau melakukan perlindungan terhadap saksi sejak awal pemeriksaan dan bukan hanya sebatas saat pengadilan digelar saja. Untuk itu, dana perlindungan saksi harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya. Ifdhal menganggap, sebenarnya peraturan pemerintah (PP) mengenai perlindungan saksi dan korban saja tidak cukup. "PP ini kan terbatas hanya pada pengadilan HAM. Bagaimana dengan pengadilan umumnya? Saya kira sama-sama pentingnya. Kita membutuhkan bukan sebatas PP saja, tetapi Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban demi status hukum yang lebih kuat," tandasnya. Ia menduga, polisi akan enggan membuat program perlindungan bila soal perlindungan saksi dan korban hanya pada tingkat PP. "Biayanya terlalu mahal kalau hanya pada tingkat PP," ujar Ifdhal.

2) Munarman

Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan agar pemerintah segera mengesahkan PP tentang perlindungan saksi dan tidak mengulur-ulur waktu. Tanpa adanya PP tersebut, saksi mata atau korban pelanggaran HAM berat yang menjadi "kunci" justru enggan bersaksi dan itu akan

sangat mempengaruhi keputusan hakim karena minimnya masukan. "Tanpa kehadiran saksi mata atau saksi korban yang bisa menjadi 'kunci' terungkapnya persoalan sebenarnya, maka keputusan hakim tidak akan memuaskan rasa keadilan karena minimnya masukan yang dia peroleh," tegasnya.¹⁵³ Kerjasama dan partisipasi saksi korban memainkan peran yang penting dalam pengungkapan kebenaran dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelakunya. Akan tetapi dalam banyak kasus kekerasan, saksi dan korban cenderung enggan untuk mengungkapkan tindak pelanggaran yang terjadi karena tidak adanya jaminan keamanan dan jaminan akan hasil persidangan yang menjunjung keadilan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk membuat sistem perlindungan bagi saksi dan korban.

3) Bambang Wijoyanto

Secara garis besar pendapatnya tentang perlindungan saksi sebagai berikut ; yaitu terhadap persidangan kasus pelanggaran HAM di Timtim selama Referendum, Rabu 20 Maret, tiba-tiba menyedot perhatian publik, karena kehadiran pucuk pimpinan TNI. Hal ini tentu menimbulkan berbagai interpretasi. Dalam hal ini dikatakan” yang mesti dilihat sebenarnya adalah, sejauh mana elemen-elemen yang

¹⁵³ Kompas, 1 Maret 2002

bekerja memproses kasus ini bisa bekerja dengan baik. Misalnya saja saya kasih contoh mengenai, perlindungan saksi, peraturan pemerintah mengenai rehabilitasi, terus penggantian untuk korban. Kebijakan seperti itu baru di sahkan sehari atau dua hari menjelang persidangan. Padahal yang namanya perlindungan saksi itu harusnya di berikan sejak dia melakukan penyidikan dan penyelidikan. Dan itu dalam bentuk peraturan pemerintah. Bukannya undang-undang. Dalam proses politik, undang-undang memang memerlukan waktu yang panjang. Kalau peraturan pemerintah bisa di buat cepat. Tapi kan soal biaya itu enggak ada jaminan kalau biaya itu bisa menjamin keamanan saksi. Korban atau saksi kan nanti bisa mendapatkan penggantian atau rehabilitasi. Itukan juga belum jelas apakah itu bisa di cover oleh negara. Misalnya saja dalam peraturan pemerintah tentang perlindungan saksi disebutkan bahwa, saksi akan bisa memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Lha kalau yang di duga yang melakukan pelanggaran adalah aparat keamanan, gimana dia berlindung di sana. Bahaya. Dan itu salah satu kritik saya dalam peraturan itu. Menurutnya aparat penegak hukumlah yang harus memberi perlindungan hukum. Dalam kebijakan perlindungan saksi dalam HAM ini masih bias karena terdapat aparat keamanan dan penegak hukum.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Detik.com

4) Praktisi hukum **Dindin S Maolani**

Mengingatkan, pemerintah tidak boleh lagi menunda pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban, karena keberadaannya kini mendesak. Apalagi, kini sudah ada perkara seorang saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim agung dan mantan hakim agung malahan diadili, karena dituduh mencemarkan nama baik hakim agung. Kalau UU Perlindungan Saksi dan Korban tak segera dibuat, dikhawatirkan akan muncul Endin Wahyudin-saksi yang kini diadili-lain, yang diadili karena melaporkan kasus korupsi. Walaupun begitu, Dindin menyatakan, RUU Perlindungan Saksi dan Korban tak terbatas pada kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). RUU Perlindungan Saksi dan Korban itu harus berlaku umum terhadap semua saksi atau korban dalam berbagai tindak pidana.

5) **Hariningsih.**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sesungguhnya memerintahkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan perlindungan saksi dan korban. Tetapi, sejalan dengan masukan dari masyarakat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membikin UU tersendiri mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak hanya terbatas saksi atau korban pelanggaran HAM dan kasus korupsi yang dilindungi. "RUU Perlindungan Saksi dan Korban ini berlaku umum.

Sebetulnya dalam beberapa UU, termasuk dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sudah ada perlindungan saksi itu. Tetapi, dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku umum diharapkan perlindungan itu semakin nyata," katanya lagi.”¹⁵⁵

6) M. Emy

Meski begitu, tergantung pemerintah yang menentukan. Karena mengenai hal ini masuk dalam arena politik yang telah mencampuri hukum, dan terkesan hukum ini memberi authority kepada politik," kata Emy. Menurut dia, sebaiknya lembaga-lembaga yang sudah ada dimaksimalkan atau diberdayakan sehingga tak terlalu banyak lembaga yang dapat berakibat tumpang-tindih. Sedangkan mengenai adanya RUU Perlindungan Saksi dan Korban, sementara ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Saksi dan Korban, Emy mengatakan, hal itu biar masyarakat yang menilai kerja yang diemban DPR. Ia pun menukas, bagaimana dengan perlindungan hakim? Pasalnya, kata anggota Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) ini, beban yang ditanggung hakim dalam memutuskan perkara HAM yang sebagian besar terdakwa adalah mereka yang mempunyai kekuatan maupun kekuasaan. "Apalagi militer, mereka punya pistol, kita hakim punya apa?" ujarnya. Ia menawarkan solusi agar segera dibuat UU tentang

¹⁵⁵ Hukum online

Contempt of Court. Dengan UU tersebut, katanya, semua orang yang ada di persidangan menghormati persidangan tersebut. "Coba kamu lihat bagaimana suasana sidang ketika kasus demonstrasi atau terdakwanya kaum buruh yang diadili dalam kasus buruh mogok, pasti mereka dengan ramainya menghadiri sidang dan suara yang ramai," katanya. Apabila dibandingkan dengan kondisi di luar negeri, lanjut Emy, orang di sana begitu menghormati badan peradilan. "Bagaimana mau menomorsatukan hukum kalau keadaan di persidangan seperti itu (riuh dan ricuh). UU atau PP yang dipilih untuk perlindungan saksi dan korban itu dibuat, Emy mengatakan, hal itu tergantung dari mana yang lebih efektif dalam pelaksanaannya. Mengingat dalam RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan tersebut diberikan dalam setiap tingkat pemeriksaan, adanya rumah perlindungan dan diberikannya identitas baru untuk saksi dan korban, yang notabene akan memakan biaya yang besar, Emy berkomentar bahwa untuk di Indonesia peraturan seperti itu tampaknya akan sulit diterapkan. Karena, katanya, biaya yang dibutuhkan besar dan jumlah penduduknya banyak. Sedangkan di luar negeri itu jumlah penduduknya tidak sebanyak di Indonesia. Sedangkan soal belum tersedianya PP tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi - selain PP tentang Perlindungan Saksi dan Korban - dalam memutuskan perkara HAM, ia mengatakan, dalam majelis hakim HAM

beranggotakan lima orang, yang terdiri dari dua hakim karir dan tiga hakim ad hoc. Sehingga sebenarnya putusan tersebut adalah putusan dari hakim karir, adapun maksud dari pemerintah adalah mencoba untuk mengkombinasikan antara nonkarir dengan karir, oleh karena hakim nonkarir dianggap mempunyai nilai lebih dalam hal teori. "Kita lihat saja bagaimana putusannya apakah akan menciptakan hukum atau menurut peraturan yang telah ditegaskan," katanya. Ia mengharapkan agar peradilan HAM dapat menegakkan hukum sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Sedangkan mengenai ancaman minimal pidana selama empat tahun yang termaktub dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menurut dia, tidak masalah ada ancaman minimal pidana. Meski begitu, ancaman empat tahun itu terlalu besar, karena di Yugoslavia dan Rwanda saja ancaman minimal pidana untuk kasus HAM hanya 10 bulan.¹⁵⁶

8) Yusril Ihza Mahendra

Mengatakan, soal Perlindungan Saksi sebenarnya telah diatur dalam UU perlindungan HAM, hanya tentang teknis tata caranya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. "Dalam UU Pengadilan HAM telah ada yang mengatur tentang Perlindungan Saksi, hanya tentang tata caranya

¹⁵⁶Mahakam design.com

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)," kata Yusril di Jakarta, Selasa. "Begitu juga mengenai pembayaran kompensasi, restitusi dan juga rehabilitasi itu sudah diatur di dalam UU hanya yang diperlukan adalah misalnya berapa jumlahnya, tata caranya bagaimana itu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah," tegasnya. Jadi menurut Yusril, bukan berarti bahwa Peraturan Pemerintah itu mengatur tentang Perlindungan dan Saksi, karena itu sudah diatur dalam UU, jadi hanya mengenai teknis dan tata caranya. "Draftnya sekarang sudah disusun dan itu juga nantinya akan dibahas bersama dengan melibatkan pihak kepolisian, TNI, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Bagaimana sih tata cara pengamanannya itu," ujarnya. Hal itu dimaksudnya agar nantinya, jalannya peradilan HAM itu dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu diharapkan sebelum dilaksanakan peradilan HAM, Peraturan Pemerintah tentang tata cara Perlindungan Saksi dan Korban dan juga tentang tata cara Pembayaran restitusi, kompensasi, sudah dapat disiapkan. Tentang kesiapan penyelenggaraan pengadilan HAM, Yusril mengharapkan masyarakat tidak apriori menanggapi.¹⁵⁷

9) Harkristuti Harkrisnowo

¹⁵⁷ HukumOnline, 2 Januari 2002

Telah menjadi pengetahuan umum bahwasannya menjadi saksi dalam perkara pidana bukanlah suatu hal menyenangkan. Telah diakui pula bahwa banyak kasus pidana (khususnya korupsi, narkoba-psikotropika, serta pelanggaran berat terhadap HAM) yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena keterbatasan alat bukti terutama keterangan saksi. Walau demikian, ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Sudah cukup sering media massa memberikan keenganan saksi untuk memberikan informasi pada pihak yang berwenang. Selain keenganan untuk terlibat dalam suatu proses peradilan, diidentifikasi pula adanya sejumlah saksi yang tidak muncul karena ketakutan, atau justru karena diancam oleh tersangka pelaku. Oleh karenanya, sudah tiba saatnya perhatian yang lebih besar diberikan pula pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama para saksi (termasuk saksi korban). Apabila bersandar pada asas kesamaan dalam hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, sudah sewajarnya bila jaminan perlindungan oleh negara terhadap saksi dalam proses peradilan pidana ditetapkan dalam perangkat perundangan. Dapat diprediksi, tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi sejumlah kasus-kasus besar akan sulit diungkap.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Ibid, hal.80-81

10) **Andi Hamzah**

Perlindungan saksi di negara Inggris diterapkan dalam tindak pidana pemerkosaan, dimana korban yang menjadi saksi dalam persidangan di periksa secara terpisah dengan pelaku, dengan ditempatkan secara berbeda dengan pelaku. Korban yang menjadi saksi ini diperiksa oleh hakim dengan menghadap langsung tanpa adanya pelaku.¹⁵⁹

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar mereka sependapat perlu adanya peraturan perundangan perlindungan saksi yang mengatur lebih komprehensif, di banding peraturan perundang-undangan selama ini, mengingat bahwa saksi adalah pihak yang dibutuhkan dalam proses peradilan pidana sehingga layak mendapat perlindungan dalam rangka ikut berperan dalam proses peradilan pidana.

¹⁵⁹ Andi Hamzah, Wawancara Pribadi tanggal 12 Oktober 2003

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab demi bab yang membahas Kebijakan Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang dimaksud adalah suatu keputusan yang mengariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu yang ditetapkan secara kolektif. Kebijakan ini adalah kebijakan hukum pidana yaitu kebijakan hukum pidana dalam arti luas yang mencakup hukum pidana materiil dan formil. Kebijakan untuk melindungi saksi dalam proses peradilan pidana dilihat dari bagaimana kebijakan untuk melindungi saksi selama ini, bagaimana pelaksanaannya serta bagaimana kebijakan ke depan dalam rangka melindungi saksi dalam proses peradilan pidana, secara garis besar diuraikan dibawah ini:

Berdasarkan penelitian kepustakaan diperoleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- 2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

- 3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;
- 4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- 6) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 7) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Perlindungan saksi dalam KUHAP hanya di atur secara implisit atau secara tidak langsung, tidak jelas dan bentuknya tidak kongkrit seperti, tidak ada bagaimana bentuk perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan. KUHAP lebih banyak mengatur apa yang menjadi kewajiban saksi daripada hak saksi. Sedangkan dalam Undang Undang tertentu yang mengatur perlindungan terhadap saksi hanya ditujukan dalam tindak pidana tertentu saja, sehingga tidak ada aturan yang jelas lengkap dan seragam yang mengatur perlindungan saksi.

- b. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tidak berjalan sesuai ketentuan yang ada yang di sebabkan berbagai

kendala ; seperti tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana prosedur ganti rugi bagi saksi, bentuk perlindungan yang tidak ada aturan jelas, ataupun ketidaktahuan saksi terhadap peraturan yang mengatur perlindungan terhadapnya dan keenganan/kesulitan aparat hukum untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi sebagaimana mestinya. Praktek yang terjadi seseorang yang menjadi saksi yang merasa ketakutan mendapat ancaman pihak lain sering kali secara lesan meminta bantuan perlindungan kepada pihak kepolisian yang sering terjadi dalam tindak pidana dengan kekerasan, pengeroyokan, sedang dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang dapat dilakukan untuk memberi perlindungan saksi sebatas saran-saran yang ditujukan kepada saksi.

Bahwa yang dibutuhkan seorang saksi dalam proses peradilan pidana adalah :

- 1) jaminan memperoleh keamanan dalam rangka memberi kesaksian
 - 2) ganti rugi atas kerugian yang terjadi karena kesaksian yang diberikan dalam proses peradilan.
 - 3) Perlakuan yang manusiawi dari aparat penegak hukum
 - 4) Mekanisme perlindungan yang tidak berbelit-belit
- c. Bahwa tantangan ke depan dengan memperhatikan kebijakan perlindungan saksi selama ini dan pelaksanaannya, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih mengakomodir terhadap kepentingan saksi sehingga perlu adanya suatu peraturan perundangan baru yang mengatur perlindungan saksi dalam bentuk yang lebih komprehensif, terperinci, yang menampung hal-hal yang

dibutuhkan seorang saksi dalam proses peradilan pidana. Bahwa peraturan perundang-undangan di masa depan harus realistis yang dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum ataupun pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara dan hasil yang ingin dicapai. Bahwa ketentuan yang ada yang terdapat dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban, masih perlu dilakukan penyempurnaan mengingat :

- 1) Jumlah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah mengingat banyaknya hak-hak yang dimiliki saksi yang harus dipenuhi, di samping itu pembentukan lembaga baru yang banyak harus di dukung kemampuan aparat yang profesional.
- 2) Mekanisme/prosedur yang harus ditempuh oleh saksi dalam rangka memperoleh hak-haknya seperti ganti rugi akan sulit diwujudkan jika negara tidak menanggung ganti rugi yang diderita saksi.
- 3) Jenis-tenis tindak pidana yang diatur masih terdapat kelemahan seperti tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, di samping masih mungkin interpretasi dari bunyi Pasal – Pasal mengenai tindak pidana.

B. Saran-saran

- 1) Agar kebijakan yang berlaku sekarang dilakukan inventarisir terhadap hal-hal yang kurang memperhatikan keseimbangan antara pihak pelaku dan

saksi. Bahwa sebagaimana diketahui selama ini pengaturan hak hak pelaku lebih dominan dibanding saksi/korban. Bahwa saksi dalam proses peradilan pidana mempunyai peranan yang penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya mendapat perhatian dari pembuat kebijakan.

2) Bahwa pelaksanaan kebijakan yang terjadi selama ini masih jauh dari yang diharapkan, yang disebabkan berbagai faktor, sehingga hal ini harus menjadi perhatian pihak pembuat kebijakan agar dalam membuat suatu produk perundang-undangan berdasarkan pada realitas yang terjadi di samping adanya kemampuan aparat penegak hukum yang profesional yang dapat mendukung suatu produk perundang-undangan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

3) Bahwa kebijakan yang di ambil ke depan dalam bentuk RUU Perlindungan Saksi Dan Korban masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, sehingga perlu dilakukan revisi RUU tersebut dengan melakukan analisa lebih mendalam dengan melibatkan tokoh-tokoh/pakar hukum yang berkompeten terhadap masalah perlindungan saksi dalam peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al.Wisnubroto, *Lembaga dan Pranata Hukum Dalam Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, Wisnu Siswacarita-Press, 1995
- Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Artidjo Alkostar dan M.Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perpektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994.
-, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.
-, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato pengukuhan, Diucapkan Pada peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.
-, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman, Penataran Metodologi Penelitian Hukum*, Unsoed, Purwokerto, 11-15 September 1995.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

-, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2001.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
-, *Pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Kompas, 6 April 2001 (Sebuah Essay)
-, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, 1983.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta, 1983
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*, Ghalia Indonesia, 1984.
- Hamzah Andi, *KUHP Yang telah Disesuaikan Dengan Undang Undang Baru*, Ghalia Indonesia, 1986.
-, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986.
-, *Posisi Kejaksaan dan Sistem Ketatanegaraan RI*, Seminar Hari Bakti Adyaksa, Makalah, Jakarta, 20 Juli 2000

- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, PT.Sarana Bakti Semesta, 1985
-, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi ke-2*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartono, Sunaryati, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1984.
- Harkristuti Harkrisnowo dkk, "*Laporan Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Saksi*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ICW, Jakarta, 1999
- Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia Kajian atas Pekara Pencemaran Nama Baik oleh Endin Wahyudin*, LeIP1, dictum 1,2002
-, *Menyoal Indepedensi Kejaksaan Agung*, Beberapa Catatan Pemikiran, Makalah, Jakarta.
- JE.Sahetapy, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bandung, 1992.
- Joan Miller, *Makalah Lokakarya di Universitas Indonesia*, Jakarta, 15 Juli 1991
- Martiman Prodjohamidjojo, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan KUHAP*, Dharma Pemuda, Jakarta, 1983.
- Marpaung, Ledeng, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Moch.Soegiarto, *Kejaksaan Yang Mandiri*, Kompas tanggal 22-7-1999

- Muchlis Azhar, *Peran DPR Dalam Melakukan Advokasi Kebijakan Sistem Perlindungan dan Dukungan Bagi Saksi Dan Korban*, disampaikan pada Round Table Discussion Komnas Perempuan, Jakarta, 20 Februari 2002
- M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, P.T.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Hukum Acara Pidana Memprogram Tindakan Aparat Penegak Hukum, Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH UNDIP*, Semarang, Tahun XIV, 1984
- Pujiyono, *Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Pidana sebagai Refleksi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia* (Sebuah Makalah dalam Majalah Hukum FH UNDIP, 1995)
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.(Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Bats-batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 30 Oktober 1993.
-, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, UI, Jakarta, 1994.

- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Semarang, 1983.
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Seno Adji, Indriyanto, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam Perpektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalisti Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984.
- Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Jakarta, 1992.
- Subekti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- Sunggono, *Bambang Hukum dan Kebijakanaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sudarto , *Hukum Acara Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
-, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
-, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke IV*, Semarang, 1980.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia : Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta.

- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.
- Syahrani, Riduan, *Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Yushar Yahya, *Peraturan dan Petunjuk Pra pemuntutan* (Sebuah Diktat), Jakarta 28 Mei 2002
- Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian perkara Pidana Berdasarkan KUHP : Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982.

Peraturan Perundang undangan

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
9. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
11. Rancangan Undang Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
12. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, GBHN 1999.